



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dengan baik.

Penyusunan LKPJ dan LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ dan LPPD ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Pelaihari, 23 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Tanah Laut,



Dwi Anggriani, S. STP
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19780313 199612 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi	4
1.3 Data Umum Daerah	7
1. Data Geografis	7
2. Jumlah Penduduk	9
3. Jumlah PNS	9
4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	11
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	42
3.2 Capaian Kinerja Dinas P2KBP3A Kab. Tanah Laut	64
 BAB IV PENUTUP	
Penutup	71

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.1. Dasar Hukum

Tanah Laut mulanya adalah sebuah wilayah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daswati II Banjar, memiliki wilayah yang cukup luas serta potensi yang cukup besar di beberapa bidang sebagai sumber pendapatan daerah, kehutanan beserta isinya, laut dan kekayaan alam didalamnya, barang-barang tambang yang terkandung dalam tanah, serta kesuburan lahan-lahan perkebunan dan pertanian. Potensi yang cukup besar dimiliki Tanah Laut pada masa itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, kurangnya sarana dan prasarana memadai merupakan penyebab utamanya. Oleh karena itu keadaan yang demikian senada dengan beberapa kewedanan lain yang berada di Kalimantan Selatan, hingga muncul tuntutan semangat dan keinginan kuat para tokoh untuk menjadikan Tanah Laut sebagai Daswati II. Hasrat tersebut pernah disampaikan oleh beberapa wakil Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) melalui sebuah resolusi dalam konverda LVRI se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di ibu kota kabupaten Banjar yaitu Martapura, disampaikan oleh Ach. Syahrani dan kawan-kawan pada tahun 1956.

Kemudian pada tahun 1957, H. Arpan dan kawan-kawan, selaku wakil rakyat Tanah Laut yang duduk di DPRD Banjar, memperjuangkan agar status wilayah kewedanaan yang disandang Tanah Laut dapat ditingkatkan menjadi Daswati II. Tekad tersebut membuahkan hasil dengan terselenggaranya rapat pada tanggal 3 Juni 1961, bertempat di rumah Moh. Afham, dipimpin oleh Materan HB. Rapat tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah panitia persiapan pembentukan Daswati II Tanah Laut dengan ketua umum dipegang oleh Soearjan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Tujuh Belas dengan tugas pokok melakukan persiapan penyelenggaraan musyawarah besar seluruh masyarakat Tanah Laut. Dalam pelaksanaannya panitia tersebut memiliki lima tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan dengan pemuka/tetua masyarakat guna mendapatkan dukungan.
2. Mengumpulkan data potensi daerah.
3. Mengusahakan pengumpulan dana.
4. Membuat pengumuman untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan ceramah dengan meminta kesediaan Ach. Syahrani, H. M. N. Manuar, Wedana Usman Dundrung, Mahyu Arief dan H. Abdul Wahab.

Usaha Panitia Tujuh Belas membawa hasil dengan terselenggaranya Musyawarah Besar se-Tanah Laut pada tanggal 1 dan 2 Juli 1961, dan menghasilkan resolusi pernyataan serta terbentuknya "Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Deswati II Tanah Laut" yang diketahui oleh H.M.N. Manuar.

Pada tanggal 12 Juli 1962 panitia ini menyampaikan memori Tanah Laut ke-pada Bupati banjar dan wakil DPRD GR II Banjar. Menanggapi hal tersebut ketua seksi A DPRD melakukan peninjauan ke Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 1962, hasil peninjauan di bawa kedalam sebuah sidang pada tanggal 3 September 1962, memutuskan memberikan dukungan kepada tuntutan Tanah Laut untuk dijadikan Daswati II, dengan Surat Keputusan nomor 37/3/DPRDGR/1962. Dengan diterbitkannya Surat

Keputusan tersebut, Panitia terus berusaha mendapatkan dukungan DPRD GR I Kalimantan Selatan, aspirasi ini disampaikan pula melalui Kerukunan Keluarga Tanah Laut. Atas usaha tersebut pada tanggal 26 November 1962 tim DPRD GR I melakukan peninjauan, dari hasil kunjungan tersebut DPRD GR I mendukung usaha Tanah Laut dengan terbentuknya sebuah Resolusi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Surat bernomor 12/DPRDGR/RES/1962.

Sebagai realisasi dari resolusi, DPRD GR tingkat I Kalimantan Selatan mengirimkan tim yang dipimpin ketua komisi B, yaitu Imam Sukami Handokowijoyo dan tiba di Tanah Laut pada tanggal 27 Oktober 1963 yang disambut dengan rapat umum, dilanjutkan dengan peninjauan ke daerah Kintap serta Ujung Batu, kemudian melakukan pertemuan dengan pejabat dan panitia penuntut. Dalam pertemuan dengan DPR GR RI tim mengajukan agar panitia ditingkatkan menjadi Badan Persiapan Pembentukan Deswati II Tanah Laut, dengan ketua H.M.N. Manuar. Pada tanggal 31 Oktober 1963 sidang DPRD GR tingkat I Kalimantan Selatan menyetujui resolusi yang mendesak kepada Gubernur untuk menunjuk Penguasa Daerah bagi Tapin, Tabalong dan Tanah Laut. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1964 diadakan serah terima kekuasaan Kewedanan Tanah Laut kepada Bupati Banjar yang selanjutnya pada tanggal 9 September 1964 diresmikan kantor Persiapan Tk. II Tanah Laut oleh bapak Gubernur Kalimantan Selatan, sekaligus melantik GT. M. Taberi sebagai kepala kantor persiapan.

Pada tanggal 24 April 1965 Badan persiapan yang diperbaharui dalam suatu musyawarah di Gedung Bioskop Sederhan Pelaihari yang dipimpin oleh A. Wahid dan berhasil menyusun Badan Persiapan Tk. II yang baru dengan ketua umum R. Sugiarto dan sekretaris umum adalah A. Miskat. Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November 1965, Badan Persiapan mengadakan beberapa kali rapat dan pertemuan dalam rangka mempersiapkan menyambut lahirnya Kabupaten Tanah Laut yang sudah diambang pintu. Dengan lahirnya Undang Undang nomor 8 tahun 1965,

tentang pembentukan Deswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Deswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DR. Soemarno. Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka perlu Mengevaluasi tugas pokok tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan (LKPJ) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD

1.2. Visi dan Misi

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 2019-2023 adalah “ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A adalah Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) yang berarti adalah :

Berkarya : 1. Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya

Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya

- Inovasi : 1. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
- Tertata : 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- Religiøs : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
- Aktual Sinergi : 2. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabuapten Tanah Laut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung 4 (Empat) yaitu :

1. **Pada misi 1 (Satu)** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat adalah **sasaran** Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dengan **indikator** sasaran Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-19 tahun, Meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmed-Need). **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. **Pada misi 3 (Tiga)** yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) **Tujuan** yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan **sasaran** Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan public, indicator Nilai sistem akuntabilitas kinerja SKPD dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) di dukung program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program pemenuhan, peningkatan sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM, Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja. **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan public.
3. **Pada misi 5 (Lima)** Yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah Peningkatan kinerja pembangunan yang

berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (Pembangunan Inklusif) sasaran Meningkatkan kualitas pertumbuhan Ekonomi dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) **Intervensi** Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut adalah pada capaian Meningkatkan kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender.

Sebagaimana telah diurai diatas bahwa Visi, Misi, Program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dalam 5 (Lima) Tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Data Umum Daerah

1. Data Geografis

Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut berada di bagian selatan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" sampai 115°23'31" Bujur Timur dan 3°30'33" sampai 4°11'38" Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi, wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km² atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 (sebelas) wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 130 Desa dan 5 Kelurahan.

Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km². Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut Utara Kota Banjarbaru, Selatan Laut Jawa, Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah barat Laut Jawa.

Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau. Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km².

Tabel 1.1 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut beserta luas wilayahnya

NO.	KECAMATAN	LUAS AREA	PERSENTASE LUAS KECAMATAN DENGAN LUAS KABUPATEN
1.	PANYIPATAN	336,00	9,25
2.	TAKISUNG	343,00	9,45
3.	KURAU	127,00	3,50
4.	BUMI MAKMUR	141,00	3,88
5.	BATI-BATI	234,75	6,46
6.	TAMBANG ULANG	160,75	4,43
7.	PELAIHARI	379,45	10,45
8.	BAJUIN	196,30	5,41
9.	BATU AMPAR	548,10	15,09
10.	JORONG	628,00	17,29

11.	KINTAP	537,00	14,79
-----	--------	--------	-------

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut dengan sumber data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PANYIPATAN	13,143	12,920	26,063
2.	TAKISUNG	17,136	16,599	33,735
3.	KURAU	7,311	7,212	14,523
4.	BUMI MAKMUR	7,244	7,103	14,437
5.	BATI-BATI	23,501	22,694	46,195
6.	TAMBANG ULANG	9,666	9,398	19,064
7.	PELAIHARI	40,926	40,308	81,234
8.	BAJUIN	10,197	9,788	19,985
9.	BATU AMPAR	14,678	13,999	28,677
10.	JORONG	18,360	17,371	35,731
11.	KINTAP	22,864	21,699	44,563
JUMLAH		185,026	179,091	364,117

3. Jumlah PNS

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan kedalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai

per Desember 2023 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS Daerah	5	22	27
2	PTT Daerah	8	6	14
	Jumlah	13	28	41

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	0	2	2
3	Golongan III	1	15	16
4	Golongan IV	3	6	9
	Jumlah	4	11	27

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Esselon	Jumlah		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	Esselon II	0	0	0
2	Sekretaris	Esselon II	0	1	1
3	Kepala Bidang		0	2	2
4	Kasubbag/Kepala Seksi	Esselon IV	0	2	2
5	Kepala UPT		0	1	1
	Jumlah		0	6	6

4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut TA. 2023 dengan realisasi sebesar Rp. 14.204.698.932,00,- atau 88,87% dari jumlah anggaran Rp. 15.938.818.837,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 12.785.239.527,- atau 89,39 % dari anggaran sebesar Rp. 14.302.396.470,- dan
2. Belanja Modal sebesar Rp.1.419.459.405 ,- atau 84,42% dari anggaran sebesar Rp. 1.681.422.367,- .

Adapun rincian Belanja Operasi terdiri dari 8 Program, 19 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dapat disajikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Realisasi kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.625.090.991,- atau 86,87% dari anggaran sebesar Rp. 6.474.554.118,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa diwujudkan dalam kegiatan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.413.848.631,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.410.558.631,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 3.290.000,-
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 341.000.924,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.70.2950,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 77.704.221,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.032.300,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. 7.166.500,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rp. 243.394.953,-

	Konsultasi SKPD	
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.447.250,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.047.250,-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.400.000,-
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 523.247.625,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 97.160.500,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 426.087.152,-
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 201.162.300,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 29.909.800,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 93.246.500,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 5.350.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 72.656.000,-
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 140.384.234,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 80.879.234,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 59.505.000,-
JUMLAH		Rp. 5.625.090.991,-

2. Program Pengendalian Penduduk Realisasi kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 293.450.627,- atau 89,70% dari anggaran sebesar Rp. 327.140.605,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai, belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.7 Program Pengendalian Penduduk

1	Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp. 14.420.000,-
	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Rp. 14.420.000,-
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 279.030.627,-
	Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat IntegrasiProgram	Rp. 14.044.430,-

	KKBPK di Sektor Lain	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp. 68.988.340,-
	Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Rp. 107.000.000,-
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp. 88.997.857,-
	JUMLAH	Rp. 327.140.605,-

3. Program Pembinaan Kelurga Berencana (KB) Realisasi kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.557.729.861,- atau 91,96% dari anggaran sebesar Rp. 6.043.244.219,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.8 Program Pembinaan Kelurga Berencana

	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 1.009.355.790,-
1	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp. 111.200.000,-
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp. 180.230.040,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan mini Lokakarya (Minilok)	Rp. 130.725.000,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp. 510.200.750,-
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Rp. 77.000.000,-
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 1.820.320.000,-
2	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Rp. 38.000.000,-
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp. 1.778.960.000,-
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.687.894.071,-
3	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp. 21.590.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp. 403.220.381,-

	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp. 26.760.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp. 1.221.501.250,-
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Rp. 5.822.440,-
4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp. 287.885.000,-
	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Rp. 730.145.000,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp. 322.375.000,-
JUMLAH		Rp. 5.557.729.861,-

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Realisasi kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.164.726.428,- atau 90,92% dari anggaran sebesar Rp. 2.380.739.367,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.294.974.801,-
1	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 46.082.640,-
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 14.687.440,-
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 31.240.570,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 1.595.393.778,-
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,	Rp. 477.322.000,-

	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
JUMLAH		Rp. 2.164.726.428,-

5. Program Perlindungan Khusus Anak Realisasi kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 58.026.717,- atau 70,13% dari anggaran sebesar Rp. 82.732.958,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.10. Program Perlindungan Khusus Anak

1	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 58.026.717,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 58.026.717,-
JUMLAH		Rp. 58.026.717,-

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Realisasi kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 76.357.528,- atau 83,54% dari anggaran sebesar Rp. 91.398.340,- realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 76.357.528,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 76.357.528,-
JUMLAH		Rp. 76.357.528,-

7. Program Perlindungan Perempuan Realisasi kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 43.322.569,- atau 64,88% dari anggaran sebesar Rp. 66.771.180,- realisasi kinerja keuangan tersebut

merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.12. Program Perlindungan Perempuan

	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.073.944,-
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp. 26.073.944,-
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.248.625,-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 17.248.625,-
JUMLAH		Rp. 43.322.569,-

8. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Realisasi kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 422.228.211,- atau 81,63% dari anggaran sebesar Rp. 517.238.050 realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.13. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 380.263.331,-
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 380.263.331,-
	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 41.964.880,-
2	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp. 41.964.880,-
JUMLAH		Rp. 422.228.211,-

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan Perubahan SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Tabel 2.1. EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Sampai Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	10(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.10		68,46				
2	08	02	2	01		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%		100%				
2	08	02	2	01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender			40 Perangkat Daerah	0	0		

							(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	08	02	2	03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%						
2	08	02	2	03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas			2.000 Orang	539	27%		
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.10						
2	08	03	2	01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Ditangani	100%		100%				

2	08	03	2	01	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			25 Perangkat Daerah	3	12%		
						Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Ditangani	100%		100%				
						Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			10 Orang	6	60%		
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	700 Skor		700 Skor				

2	08	06	2	02		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%		100%				
2	08	06	2	02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0	0		
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	700 Skor		700 Skor				
2	08	07	2			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%				

2	08	07	2		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	18	60%		
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	75 skor		75 skor				
2	14	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		100%				
2	14	01	2	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	1	14,29%		

2	14	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	0	0		
2	14	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%				
2	14	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan		25 orang/bulan		50%		
2	14	01	2	02		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	0	0		
2	14	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%				
2	14	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0	0		
2	14	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%		

2	14	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%		
2	14	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2	14	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50%		
2	14	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%				
2	14	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit		25 unit	9 unit	36%		
2	14	01	2	07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit		9 unit	5 unit	55,56%		

2	14	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%				
2	14	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50%		
2	14	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50%		
2	14	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%				
2	14	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%		

2	14	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	4 Unit	50%		
2	14	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			23 Unit	4 Unit	14%		
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk			1,56%				
2	14	02	2	01		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 %		100 %				
2	14	02	2	01	05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan	jumlah Dokumen Penguatan kerja sama Pelaksanaan Pendidikan			2 Dokumen	1 Dokumen	50%		

2	14	02	2	02	13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			12 Laporan	4 Laporan	33.34%		
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,22						
2	14	03	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%		100%				
2	14	03	2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			12 Organisasi	6 Organisasi	50%		

2	14	03	2	01	04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			1 Dokumen	0 Dokumen	0		
2	14	03	2	01		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			12 Laporan	6 Laporan	50%		
2	14	03	2	01		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			12 Laporan	6 Laporan	50%		
2	14	03	2	01		Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			12 Laporan	6 Laporan	50%		

2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %		100 %				
2	14	03	2	02		Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			12 Organisasi	6 Organisasi	50%		
2	14	03	2	02	04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	556 Orang		556 Orang		300 Orang		

2	14	03	2	03		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Alat, Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Pelayanan KB	100 %							
2	14	03	2	03		Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			79 Laporan	48 Laporan	60,70%			
2	14	03	2	03	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1171 Orang	486 Orang	40 %			
						Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			10 Unit	0 Unit	0 %			
2	14	03	2	03	08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas			90 Laporan	18 Laporan	20 %			

						Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
2	14	04	2	01	04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			33 Orang	33 Orang	100%		
						Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			801 Orang (801 orang / 3 bulan, untuk 10 bulan (mar - des))	801 Orang	60 %		

						Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			11 Kelompok	10 Kelompok	90,91%		
2	14	04	2	01	07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			3 Laporan	2 Laporan	66,67%		

Beberapa Kegiatan mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Anggaran Perubahan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Alasan Berubah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	725.152.109	758.140.528	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	554.789.671	517.238.050	
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Wewenang Kabupaten/kota	499.989.881	467.675.545	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Wewenang Kabupaten/kota	499.989.881	467.675.545	Pengurangan belanja perjalanan dinas luar daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	33.126.140	66.771.180	
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.143.600	27.964.040	
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.143.600	27.964.040	Penambahan belanja makan minum kegiatan, perjalanan dinas, souvenir untuk masyarakat
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.982.540	38.825.040	
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	28.3982.540	38.825.040	Penambahan belanja tenaga ahli, prjalanan dinas pendampingan kasus dan penanganan kasus
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	171.170.679	171.170.679	
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	91.398.340	91.398.340	

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.398.340	91.398.340	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	45.837.958	82.732.958	
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.837.958	82.732.958	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.837.958	82.732.958	Penambahan belanja tenaga ahli, prrjalanan dinas pendampingan kasus dan penanganan kasus, serta pembuatan baliho
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.061.953.347	15.225.678.309	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.363.030.227	6.474.554.118	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.311.151.248	5.111.151.248	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.306.151.528	5.106.151.528	Pergeseran beberapa rincian belanja
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	4.999.720	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.780.128	365.625.337	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.445.923	3.445.923	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.414.910	90.274.910	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.059.295	13.059.295	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	0	9.985.209	Penambahan untuk pameran hari jadi Tanah Laut
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.860.000	245.860.000	1. Penambahan untuk belanja makan minum rapat

			2. Penambahan perjalanan dinas 3. Pergeseran belanja dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 31.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.182.743	569.876.661	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.000.000	113.000.000	Untuk kekurangan pembayaran tagihan listrik dan air
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.182.743	456.876.661	Penambahan untuk honorarium, asuransi Kesehatan dan tenaga kerja PTT bulan Desember 2023
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.750.000	239.734.764	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	30.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000	9.750.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		99.984.764	Balai penyuluh KB Kurau perlu rehab berat di bagian teras dan rehab Gudang arsip
Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.166.340	178.166.340	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	114.742.580	114.742.580	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.423.760	63.423.760	

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	327.140.605	327.140.605	
Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	18.730.250	18.730.250	
Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	18.730.250	18.730.250	
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	308.410.355	308.410.355	
Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat IntegrasiProgram KKBPK di Sektor Lain	16.140.218	16.140.218	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	77.016.957	77.016.957	
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	113.400.000	113.400.000	
Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	101.853.180	101.853.180	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	5.941.364.256	6.043.244.219	
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.068.528.670	1.068.528.670	
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000	120.000.000	
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	207.468.670	207.468.670	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan mini Lokakarya (Minilok)	137.500.000	137.500.000	
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	523.560.000	523.560.000	
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.820.320.000	1.820.320.000	

Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	38.000.000	38.000.000	
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.782.320.000	1.782.320.000	
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.885.487.586	1.885.487.586	
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.590.400	21.590.400	
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	548.723.504	548.723.504	Penambahan jasa komplikasi, penambahan akseptor MOW, Oreintasi kemampuan dokter melaksanakan MOP
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.515.000	29.515.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.307.805.726	1.379.709.205	
Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	7.847.440	7.847.440	
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.167.010.000	1.167.010.000	
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	812.350.000	812.350.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	354.660.000	354.660.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	2.430.436.259	2.380.739.367	
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.430.436.259	2.380.739.367	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan	581.990.005	477.322.033	Penyesuaian harga BKB Kit Stunting.

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32.251.374	47.251.374	untuk pembinaan PIK R, Sosialisasi INI GENTING dan untuk mendukung penurunan stunting
Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.687.440	14.687.440	
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.682.100.000	1.806.810.000	Orientasi untuk TPK, belanja perjalanan dinas, makan minum kegiatan, pendampingan input data elsimile untuk TPK
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	104.720.000	0	
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.687.440	34.668.520	Pelatihan untuk UPPKA Kelompok Binaan, orientasi pengolahan atau pembuatan makanan local untuk ketahanan keluarga dan atasi stunting

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan dituangkan menggunakan table sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

No	Urusan Pemerintah Bidang	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kelompok home industri yang dibina 38 Kelompok	38 Kelompok			
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi organisasi perempuan 15 Organisasi	15 Organisasi			
				Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan			

				Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas 2000 Orang	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas 2026 Orang			
				Kegiatan : Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Persentase Pemenuhan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 100%	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Persentase Pemenuhan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 100%			
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan			

					Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Perangkat Daerah	Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Perangkat Daerah			
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
				Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 100 %	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 100 %			

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen			
				Program Perlindungan Perempuan					
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perempuan yang Ditangani 100 %	Persentase Kasus Perempuan yang Ditangani 100 %			
				Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Perangkat	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Perangkat			

					Daerah	Daerah			
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perempuan yang ditangani 100 %	Persentase kasus perempuan yang ditangani 100 %			
				Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 19 Orang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 19 Orang			
				Program Perlindungan Khusus Anak					
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah	Persentase kasus anak yang ditangani 100 %	Persentase kasus anak yang ditangani 100 %			

				Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 41 Anak	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 41 Anak			

Tabel 3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Urusan Pemerintah Bidang	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP2KBP3A		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan TPP ASN 12 bulan	Jumlah bulan pembayaran gaji dan TPP ASN 12 bulan			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen			

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket			
2		DP2KBP3A		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1			

			Dokumen	Dokumen			
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%	Persentase Pemenuhan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan air dan listrik 12 bulan	Jumlah pembayaran tagihan air dan listrik 12 bulan		

3	Sekretariat	DP2KBP3A		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan			
				Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Paket	Jumlah Paket Mebel yang tersedia 24 Paket	Satu set meja kursi rapat tidak terealisasi karena tidak ada di RKBMD		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit			

				Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4		DP2KBP3A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/mobil jabatan yang terpelihara selama 1 tahun 1 unit	Jumlah kendaraan dinas/mobil jabatan yang terpelihara selama 1 tahun 1 unit			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terprlihara 23 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara 17 unit			

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit	Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit			
1	DP2KBP3A		Pengendalian Penduduk						
			Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 1 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penguatan kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 1 2 Dokumen	-			

				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 %	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 %			
2	DP2KBP3A	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Yang Di update 2 buah	Jumlah Rumah Data Kependudukan Yang Di update 2 buah	-				
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga 11 Balai Penyuluh KB	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga 11 Balai Penyuluh KB	-				
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-				

				12 Dokumen	12 Dokumen			
3	DP2KBP3A	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 100%					
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	-			

				Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 12 Organisasi	Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 12 Organisasi			
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	JJumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen	JJumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen	-		

				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan			
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 12 Laoran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 12 Laoran			
				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan			

				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Alat, Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Pelayanan KB 100 %	Persentase Pengendalian Alat, Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Pelayanan KB 100 %			
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 79 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 79 Laporan	-		
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1171 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1062 Orang			

				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 90 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 90 Laporan			
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 33 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 33 Orang			
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 10 Unit	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 10 Unit			

				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB					
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 12 Dokumen			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 23 Kampung KB / selama 12 bulan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 23 Kampung KB / selama 12 bulan			

4		DP2KBP3A		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) 31 Unit	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) 31 Unit			
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,			

				BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan			
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 33 Kader	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 33 Kader			
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			

					S) 801 Orang	S) 801 Orang			
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) 3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) 3 Laporan			

3.2. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Tabel 3.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	40 SKPD	DP2KBP3A	
				2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	33 Program 37 Kegiatan	DP2KBP3A	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 (Dua) -Banjarmasin Posat -Radio Tuntung Pandang	DP2KBP3A	
				2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	2 (Dua) -UPTD PPA -UPPA POLRES	DP2KBP3A	
				3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	41/41x 100% = 100%	DP2KBP3A	

				4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 (Satu) -UPTD PPA	DP2KBP3A	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	29 (Dua puluh sembilan)	DP2KBP3A	
				2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	440 (Empat ratus empat puluh) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasirangan 3 x 30 = 90 ▪ Pemulasaran Jenazah 8 x30 = 240 ▪ Menghias Tudung Saji 1 x 50 = 50 ▪ Pembuatan Kue Kering 1 x 60 = 60 	DP2KBP3A	
				3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 (Satu) -GOW	DP2KBP3A	
				4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintahkabupaten/kota	1 (Satu) -GOW	DP2KBP3A	
				5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah	-	DP2KBP3A	

				yang sudah dievaluasi				
				6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2 (Dua) -UPTDPPA -UPPA POLRES	DP2KBP3A	
				7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	21/21x100% =100%	DP2KBP3A	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	DP2KBP3A	
				2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,16	DP2KBP3A	
				3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	31,88	DP2KBP3A	
				4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBK (advokasi dan KIE) = 180.522 ----- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBK (advokasi dan KIE) = 361.044	38,75%	DP2KBP3A	
				5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	1.029	DP2KBP3A	

		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP Jumlah faskes yang melayani KB MKJP = 27 ----- x 100% Jumlah faskes = 27	100%	DP2KBP3A	
				2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) = 5.262 Jumlah peserta KB Aktif ----- x 100% Jumlah PUS = 49.997	10,53% (dari New SIGA)	DP2KBP3A	
				3	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	DP2KBP3A	
				4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan Jumlah Peserta KB persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern = 2378 ----- x 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinaan = 5.733	41,48%	DP2KBP3A	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah Jumlah Peserta KB Aktif Terendah= 48 ----- x 100%	0,09%	DP2KBP3A	

				Jumlah Pasangan KB Aktif = 49.998			
			2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jumlah peserta KB pada keluarga penerima = 29.353 ----- x 100% Jumlah Keluarga PBI = 44.101	66,55%	DP2KBP3A	

Pelaihari, 23 Januari 2024

Mengetahui ,
 Plt. Kepala Dinas P2KBP3A
 Kabupaten Tanah Laut,

Dwi Anggriani, S. STP
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19780313 199612 2 001

Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib						
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = Rp 294.968.413.698 ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD = Rp 2.233.750.361.037	13,21%	DP2KBP3A BPKAD
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi = 41 ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kab/Kota = 41	100%	DP2KBP3A & Disdukcapil
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 21 ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan = 126,134	16,649	DP2KBP3A & Disdukcapil
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR= $5\sum ASFR$	2,035	DP2KBP3A
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 49.997 ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = 61.166	81,74%	DP2KBP3A

		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 3.076 ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur = 61.166	5,03%	DP2KBP3A	

Pelaihari, 23 Januari 2024

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Tanah Laut,



Dwi Anggriani, S. STP
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19780313 199612 2 001

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disampaikan Kepala Daerah.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut akan terus dilanjutkan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kondisi yang belum sesuai dengan seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu evaluasi dilakukan terus menerus untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LPPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan informasi pembangunan bagi seluruh warga Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 23 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Tanah Laut,



Dwi Anggriani, S. STP
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19780313 199612 2 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

Nomor : 400.2 / 362 / DP2KBP3A / VII / 2023
Sifat : Penting
Perihal : Undangan Bimbingan Teknis PUG/PPRG

Pelaihari, 03 Juli 2023

Kepada Yth.

di-

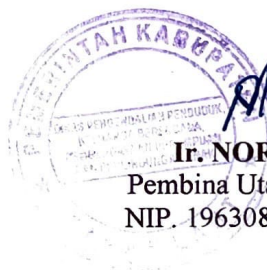
Tempat

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan **Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan, Penganggaran, Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**, dengan ini kami mengundang bapak/ibu untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, s.d Rabu/10 s.d 12 Juli 2023
Jam : 09.00 WITA – Selesai
Tempat : Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Nor Hidayat
Ir. NOR HIDAYAT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630824 199403 1 007

**RUNDOWN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
(PUG)/PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)"
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Senin, 10 Juli 2023	08.30 – 09.00	Registerasi Peserta	Panitia
	09.00 – 10.00	1. Pembukaan 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Sambutan Kepala DP2KBP3A Kab. Tanah Laut 4. Doa	M.C
	10.00 – 10.15	COFFEE BREAK	
	10.15 – 12.15	Materi Seputar PUG (Zoom Meeting)	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	12.15 – 12.45	ISHOMA	
	12.45 – 14.45	Materi Seputar PUG (Zoom Meeting)	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	14.45 – 15.00	COFFEE BREAK	
	15.00 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
	17.00	Penutup	
Selasa, 11 Juli 2023	09.00 – 11.00	Materi tentang Memahami Analisa Gender	DPPPAKB Provinsi
	11.00 – 11.30	COFFE BREAK	
	11.30 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
	12.30 – 13.30	ISOMA	
	13.30 – 15.30	Materi tentang Pembuatan Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)	DPPPAKB Provinsi
	15.30 – 16.00	COFFE BREAK	
	16.00 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
	17.00	Penutup	
	09.00 – 11.00	Materi tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Bappeda
	11.00 – 11.30	COFFE BREAK	
	11.30 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia

Rabu, 12 Juli 2023	12.30 – 13.30	ISOMA	
	13.30 – 15.30	Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan untuk PPRG	Inspektorat
	15.30 – 16.00	COFFE BREAK	
	16.00 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
	17.00	Penutup	

**PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
(PUG)/PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

No	Instansi/Organisasi	Jumlah
①	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut	1 org
②	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut	1 org
③	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	1 org
④	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut	1 org
⑤	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut	1 org
⑥	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tanah Laut	1 org
⑦	Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	1 org
⑧	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut	1 org
⑨	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut	1 org
⑩	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	1 org
⑪	Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	1 org
⑫	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut	1 org
⑬	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kab. Tanah Laut	1 org
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Laut	1 org
⑮	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanah Laut	1 org
⑯	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut	1 org
⑰	Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut	1 org
⑱	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut	1 org
⑲	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tanah Laut	1 org
⑳	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut	1 org

21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 org
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 org
23	Badan Pendapatan Daerah	1 org
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 org
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 org

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender/Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun Anggaran 2023
Tempat : DP2KBP3A Kab. Tanah Laut
Hari/Tgl : Senin s.d Rabu, 10 s.d 12 Juli 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin L/P		Instansi/Organisasi	No. Hp	Tanda Tangan		
						10 Juli 2023	11 Juli 2023	12 Juli 2023
1	LUSDI	L		Kominfo	085290771110			
2	M. JUMAIDI	L		Dispora	081382131555			
3	Syafran	L		Dukcapil	085248779907			
4	ASMIYATI		P	BPKAD.	0823 5444 1455			
5	HALIMATUS SA'ADIAH		P	DPMD	0821 5790 7878			
6	PITAWAN		P	DISPAR	0852 1623 2929			
7	Gusti Fahmidilloh	L		Bashub	082252518899			
8	FITERLYZMI	P		Banker	081349422078			
9	MARIA	P		Dibakerind	08115031555			
10	Almaransyah	L		BKPSDM	0813 4953 6676			
11	Lilis Darmayanti	P			0813 4526 5910			
12	Mardiana	P		DEPP	0813 5155 4477			
13	Saptaning Zulaelah	P		DPKPLH	082158027206			
14	Dhea Justha S.		P	BPBD	0821 5121 4234			
15	Leni		P	Distanharbun	081348272227			
16	Henny Fitriawati		P	Satpol pp DK	0852-4951-0202			
17	Devy Darmayanti		P	Disnakerwan	0853-4845-1500			

	Muhammad Ikhsan Naparin	L		DPUPRP Tanah Laut	0852 4991 9445			
	AFARIANI	L		DISDIKAD	081348712333			
20	VUSTINA		P	Kesbangsep	081345266347			
21	Maulidia Nurul M.		P	FAD TANAH LAUT	0812 50868067			
22	Ratmi Setiada		P	DUS PUSAIP	0822 52824612			
23	Suharto PS, S.T, M.M.	L		DPSA&B PROV	0811 5115 434			
24	Sri pamungkas Ayu P, S.Psi	P		—————	0811 511 982			
25	Shofia Insari	P		—————	085947907220			
26	Rachmy Shanty	P	P	Dinas Sosial	085248554969			
27	Panoto Dwi -P.	L		DisKordeg.	081256568836			
28	Kasru	L	P	Bappeda	0853 49350222			
29	Sumatra dipura	L		inspektat				
30	Jayanti Oktiana		P	DP2KBP3A	0853 4575 0003			

Yang Membuat Daftar,

 Jayanti Oktiana, AM.Keb
 NIP. 1985102212010012010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 21003 Fax (0512) 21300 Pelaihari 70814
PELAIHARI

Nomor : 400.2 / 3228 / DP2KBP3A-TU / XI / 2023
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pertemuan Pengarusutamaan Gender
melalui PPRG

Pelaihari, 30 November 2023

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di -
Tempat

Dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.




Berdasarkan hal di atas, maka Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) perlu dilakukan oleh masing-masing SKPD. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui *Gender Analysis Pathway* (GAP), hasilnya dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) dan menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian dalam penyusunan dokumen RKA/DPA SKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan diadakan pertemuan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Desember 2023
Waktu : Pukul 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula DP2KBP3A Tanah Laut

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.


An. BUPATI TANAH LAUT
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640425 198703 1 012

JABATAN	PARAF
ASISTEN.....	
KEPALA SKPD	
KABID	
KASI/SUBID	

**SUSUNAN ACARA
PERTEMUAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)/
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

Hari/Tanggal	Waktu	Acara	Keterangan
Rabu/ 06 Desember 2023	09.00 – 09.15 WITA	Pembukaan	M.C
	09.15 – 09.25 WITA	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Do'a	Panitia
	09.25 – 09.35 WITA	DO'A	Panitia
	09.35 – 10.00 WITA	Sambutan Kepala DP2KBP3A Kab. Tanah Laut	Kepala DP2KBP3A
	10.00 – 12.00 WITA	Materi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Fasilitator PUG DPPPAKB Provinsi
	12.00 – 12.30 WITA	ISOMA "	Panitia
	12.30 – 14.30 WITA	Materi Pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)	Fasilitator PUG DPPPAKB Provinsi
	14.30 – 15.00 WITA	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
	15.00 – 15.10 WITA	Penutup	Panitia

Lampiran
NOMOR : 400.2/ /DP2KBP3A-TU/XI/2023
TANGGAL : 30 Nopember 2023

**DAFTAR UNDANGAN
PERTEMUAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)/
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

No	Jabatan/Instansi
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Inspektur Kab.Tanah Laut
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Kepala Dinas Kesehatan
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9	Kepala Dinas Perhubungan
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Kasubag Perencanaan DP2KBP3A
13	Camat Se-Kabupaten Tanah Laut
14	Lurah Se-Kecamatan Pelaihari

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Acara : Pertemuan PUG Melalui PPRG Tahun 2023

Tempat : Aula DP2KBP3A Kab. Tanah Laut

Hari/Tgl : Desember 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin LP	Instansi/Organisasi	No. HP	Tanda Tangan
1	Andris Evans	L	Kabmas P2KBP3A		
2	Rahmah	P	Plt Kabid	0853 4575 0003	[Signature]
3	Suhart PS-ST-MM	L	Fasilitasi PPRG	0811 511 0934	[Signature]
4	Fibriani, S-SOS M-AP	P	Kec-Tb-ulung	082199942551	[Signature]
5	Rizki Amalia N	P	Kel. Plh	081223 034316	[Signature]
6	Inari Merina	P	Kel. Angsau	081250103360	[Signature]
7	Fitriyanti	P	Banke	081343422078	[Signature]
8	Martina	P	Banke	08240335058	[Signature]
9	H. Sulimih	L	Kec. BM	081247132515	[Signature]
10	Rahmad Ridko	L	Kec. Panyipatan	0813 49421009	[Signature]
11	Rinni A	P	Kec. Palohari	0812 5175201	[Signature]
12	Ati Santhi	P	Kec. Batu Ampar	082225422005	[Signature]
13	IRNU ALAN. F	L	Kec. Jarang	0815259074821	[Signature]
14	Novan Andidyan	L	District	082155655755	[Signature]
15	Ratna	P	Dispusid		[Signature]
16	Eri Yuliani	P	Dispusid	081247132515	[Signature]
17	Muhammad	P	Kel. Sahi	0812 5670 5106	[Signature]
18	Nasrullah Fahmi	L	Kec. Bajun	0811 507727	[Signature]
19	AAN Nothuda	L	D. PWD	08125641027	[Signature]
20	Tenny Fitriane	P	Satpol. PP	0852 4091-0202	[Signature]
21	Hj. Dahliani	L		0812 51605247	[Signature]
22	Aqur Haryant	L	Kec-Talci Sug	0812519 5266	[Signature]
23	MUTHAINAH	P	BPKAD	08215371 4610	[Signature]
24	ASMIYATI	P	BPKAD	0823 5444 1455	[Signature]
25	Wardana R. A	L	Kel. Pabahan an	0852 45555762	[Signature]
26	Hj. Rubayah, S.Kg	P	Kel. Bati-Bati	0896 3588 9484	[Signature]
27	JUSDI Purandari	L	Kec. Wndang	0812 54526060	[Signature]
28	Allyan sur	L	Kel. Karang Liris	0815 24001406	[Signature]
29	Jayanti Oktiana	P	DP2KBP3A	0853 4575 0003	[Signature]
30	Irma damayanti	P	PPA		[Signature]

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA

a.n. Plt. Kepala Dinas P2KBP3A
Sekretaris,



Dwi Anggrani, S. STP
19780313 199612 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN PUG PADA PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH DIEVALUASI MELALUI
ANALISIS GENDER DI KABUPATEN TANAH LAUT

N O	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	91,398,340
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/ Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82,732,958
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	38,825,040
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27,946,140
		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN / Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	54,799,790
		PROGRAM PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN / Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	467,675,545
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM/ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/ Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	28,617,276,000
3	DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar/ Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar	55,510,090

4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1,341,653,650
5	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22,418,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129,115,000
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	75,000,000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	44,917,912
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	28,401,091
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	300,000,000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	70,286,672
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	349,999,660
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	245,456,776
9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN/ Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	672,479,119
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN/ Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	468,740,000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN/ Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,307,443,781

		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI/ Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi/ Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi	63,299,694
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN/ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah/ Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	203,401,730
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING/ Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota	264,139,543
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN/ Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan/ Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	18,462,740
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN/ Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	59,789,146
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN/ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah/ Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	203,126,039
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)/ Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Potensi Pengembangan Usaha Mikro	2,183,017,085
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah/ Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	193,495,282
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Kegiatan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah/ Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	241,064,872,346
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	18,309,245
11	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial/ Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	4,436,860,000
12	DINAS PETERNAKAN DAN HEWAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,997,605
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/ Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	134,929,754

		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tanaman dan Mikroorganisme Kewenangan/ Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan dan Tanaman	69,972,856
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PRMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILISASI UMUM (PSU)/ Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan/ Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilisasi Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	118,640,000
14	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	PROGRAM Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8,998,138,368
		PROGRAM Perizinan Usaha Pertanian/ Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Izin Kegiatan Uahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	22,082,200
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	60,000,000
		PROGRAM Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	344,845,087
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dg komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	135,322,746
		PROGRAM Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian/ Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	276,159,903
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa	200,000,000
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK/ Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk/ Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	212,409,510
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH/ Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN/ Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	100,000,000
17	KELURAHAN PELAIHARI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	314,893,935
18	KELURAHAN ANGSAU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	339,693,640
19	KELURAHAN SARANG HALANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	163,145,520

20	KELURAHAN PABAHANAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	257,334,160
TOTAL			294,968,413,698

Pelaihari, 23 Januari 2024

Pt. Kepala Dinas,



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001



TALK SHOW TALA MENYAPA



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT



"KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK"

Pahimah, SKM, M.Kes

PLT HABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &
PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA UPTD PPA

KAMIS 7 DESEMBER 2023 PUKUL 09.00 - 10.00 WITA

INTERAKTIF MELALUI  **08115012304** 

LIVE 
STREAM

Host
Nelly Arfiani.SH, M.M
Setyawan Zuhri

 LPPL Tuntung pandang FM

 RADIO TUNTUNG PANDANG FM 102.3 MHz

 @radiotuntungpandang

LIVE  **STREAMING** tpfm.tanahlautkab.go.id

Santri di Tala Jadi Korban Pencabulan

Malu Bertemu Teman, Santri Korban Penodaan Oknum Ustaz di Kabupaten Tala Ini Ingin Belajar Daring

Selasa, 7 November 2023 13:24 WIB

[Baca di App](#)

Penulis: **Idda Royani** | Editor: **Alpri Widianjono**



BANJARMASINPOST.CO.ID/IDDA ROYANI

Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

A⁻

A⁺



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

2) IKK Outcome : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ $= \frac{41}{41} \times 100\%$ $= 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi adalah jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan;▪ Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) adalah jumlah penduduk usia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan.

Pelaihari, 23 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas,

DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

DAFTAR KASUS ANAK DI UPTD PPA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023
PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2023

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAPORAN	JENIS KASUS	ALAMAT	RUJUKAN DARI	TINDAK LANJUT
1	Kec. Kintap	02 Januari 2023	Eksplotasi / pekerja anak	Ds. Salaman Kec. Kintap	Laporan masyarakat	Koordinasi
2	Kec. Jorong	02 Januari 2023	Pengancaman via online / lainnya	Ds. Asam Jaya Kec. Jorong	Sendiri	Terima pengaduan/arahan
3	Kec. Jorong	04 Januari 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Muara Asam-Asam Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
4	Kec. Pelaihari	04 Januari 2023	Pelecehan Seksual / Sodomi, Psikis	Jalan Sawahan Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
5	Kec. Pelaihari	09 Januari 2023	Psikologis / Lari dari rumah	Ds. Sungai Riam Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
6	Kec. Batu Ampar	25 Januari 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Gunung Melati Kec. Batu Ampar	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
7	Kec. Takisung	08 Februari 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Benua Lawas Kec. Takisung	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
8	Kec. Takisung	08 Februari 2023	Pelaku Pelecehan Seksual / ABH	Ds. Telaga Langsung Kec. Takisung	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
9	Kec. Pelaihari	02 Maret 2023	Kekerasan Psikis	Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	Orang tua	Pemeriksaan Psikologis
10	Kec. Pelaihari	02 Maret 2023	Kekerasan Psikis	Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	Orang tua	Pemeriksaan Psikologis
11	Kec. Bajuin	14 Maret 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Sungai Bakar Kec. Bajuin	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
12	Kec. Kintap	24 Maret 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Kebun Raya Kec. Kintap	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
13	Kec. Jorong	27 Maret 2023	Kekerasan fisik / Pengeroyokan, Psikis	Ds. Asam-Asam Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
14	Kec. Panyipatan	06 April 2023	Eksplotasi / pekerja anak di warung malam	Ds. Kuringkit Kec. Panyipatan	Satpol PP dan Damkar	Pengarahan dan Pemulangan
15	Kec. Kurau	10 April 2023	Pelecehan Seksual, Psikis	Ds. Maluka Baulin Kec. Kurau	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
16	Kec. Batu Ampar	02 Mei 2023	Pelecehan Seksual, Psikis	Ds. Satui Sungai Danau Kab. Tanbu	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
17	Kec. Jorong	23 Mei 2023	Anak Berhadapan Hukum	Ds. Asam-Asam Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis

18	Kec. Jorong	23 Mei 2023	Anak Berhadapan Hukum	Ds. Sungai Baru Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
19	Kec. Kurau	13 Juni 2023	Diduga eksplotasi, Psikis	Ds. Padang Luas Kec. Kurau	Orang tua	Pemeriksaan Psikologis
20	Kec. Pelaihari	23 Juni 2023	Psikologis	Ds. Panggung Kec. Pelaihari	Sekolah	Pemeriksaan Psikologis
21	Kec. Takisung	03 Juli 2023	Diduga tidak terurus, Psikis	Ds. Ranggung Dalam Kec. Takisung	Orang tua	Pemeriksaan Psikologis
22	Kec. Jorong	05 Juli 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Batalang Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
23	Kec. Pelaihari	24 Juli 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Polsek Pelaihari	Pemeriksaan Psikologis
24	Kec. Bati-Bati	28 Juli 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Pandahan Kec. Bati-Bati	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
25	Kec. Batu Ampar	01 Agustus 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
26	Kec. Pelaihari	07 Agustus 2023	Pelecehan Seksual	Ds. Panggung Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
27	Kec. Pelaihari	07 Agustus 2023	Dugaan Pelaku Pencabulan	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
28	Kec. Pelaihari	21 Agustus 2023	Pesta minuman keras dan suka sesama jenis	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis dan Pemulangan
29	Kec. Pelaihari	21 Agustus 2023	Pesta minuman keras dan suka sesama jenis	Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis dan Pemulangan
30	Kec. Pelaihari	21 Agustus 2023	Pesta minuman keras dan suka sesama jenis	Jalan Kamboja Banjarmasin	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis dan Pemulangan
31	Kec. Pelaihari	29 Agustus 2023	Dugaan KDRT	Jl. Matah Kec. Pelaihari	Datang Sendiri	Terima pengaduan/arahan
32	Kec. Pelaihari	01 September 2023	Dugaan sebagai korban pelecehan seksual	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
33	Kec. Bati-Bati	05 September 2023	Pelecehan seksual	Ds. Banyu Irang Kec. Bati-Bati	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
34	Kec. Bati-Bati	08 September 2023	ABH tersangka penyebaran/penjualan VGK	Ds. Padang Kec. Bati-Bati	KPAI	Pemeriksaan Psikologis
35	Kec. Bajuin	06 Oktober 2023	Pelecehan Seksual/Pencabulan	Ds. Kunit Kec. Bajuin	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
36	Kec. Bajuin	02 Nopember 2023	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Ds. Sungai Bakar Kec. Bajuin	Polsek Pelaihari	Pemeriksaan Psikologis
37	Kec. Pelaihari	08 Nopember 2023	Pelecehan Seksual/Pencabulan	Ds. Podok Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar	Polsek Pelaihari	Pemeriksaan Psikologis

38	Kec. Pelaihari	23 Nopember 2023	Kekerasan Fisik, Psikis/Bullying	Ds. Telaga Kec. Pelaihari	Kepala Sekolah	Penjangkauan
39	Kec. Batu Ampar	29 Nopember 2023	Seksual/Persetubuhan	Ds. Bluru Kec. Batu Ampar	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
40	Kec. Takisung	01 Desember 2023	Dugaan Percobaan Pelecehan Seksual	Ds. Ranggung Kec. Takisung	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
41	Kec. Takisung	01 Desember 2023	Dugaan Pelecehan Seksual	Ds. Kuala Tambangan Kec. Takisung	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001

Pelaihari, 23 Januari 2024
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan
dan Anak



PAHIMAH, SKM, M.Kes
Pembina (IVa)
NIP. 19740404 199903 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

DAFTAR JUMLAH KLIEN KASUS ANAK DI UPTD PPA KABUPATEN TANAH LAUT
PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2023

NO	JUMLAH KLIEN	JUMLAH PELAPORAN/RUJUKAN					DI RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA	KASUS/KLIEN SELESAI	ASAL KLIEN (Wilayah Kecamatan)
		UPPA POLRES	SATPOL PP	DATANG SENDIRI	MASYARAKAT	LAINNYA			
1	41	24	4	2	1	10	0	8	Pelaihari, Kintap, Jorong, Kurau, Panyipatan, Takisung, Batu Ampar, Bati-Bati, Bajuin dan Luar Kab.

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas

DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001

Pelaihari, 23 Januari 2024
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan
dan Anak


PAHIMAH, SKM, M.Kes
Pembina (IVa)
NIP. 19740404 199903 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

Pelaihari, 22 Januari 2024

Nomor : 400.12.4.4/071/Disdukcapil/I/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Data Penduduk

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut

di –

Pelaihari

Menghubung surat Nomor : 100.1.7/31/I/2024/DP2KBP3A tanggal 09 Januari 2024 Perihal Permintaan Data, terlampir kami sampaikan Data Kependudukan sesuai format yang diminta dengan sumber data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007

**DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

DATA PENDUDUK PER KECAMATAN PER JENIS KELAMIN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	17,136	16,599	33,735
2	JORONG	18,360	17,371	35,731
3	PELAIHARI	40,926	40,308	81,234
4	KURAU	7,311	7,212	14,523
5	BATI BATI	23,501	22,694	46,195
6	PANYIPATAN	13,143	12,920	26,063
7	KINTAP	22,864	21,699	44,563
8	TAMBANG ULANG	9,666	9,398	19,064
9	BATU AMPAR	14,678	13,999	28,677
10	BAJUIN	10,197	9,788	19,985
11	BUMI MAKMUR	7,244	7,103	14,347
TOTAL		185,026	179,091	364,117

DATA PENDUDUK WANITA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

NO	KECAMATAN	USIA			
		15-19 TAHUN	20-24 TAHUN	25-29 TAHUN	30-34 TAHUN
1	TAKISUNG	1,177	1,429	1,167	1,241
2	JORONG	1,306	1,442	1,319	1,443
3	PELAIHARI	2,962	3,275	3,032	3,256
4	KURAU	569	626	491	592
5	BATI BATI	1,738	1,904	1,747	1,785
6	PANYIPATAN	952	1,069	956	988
7	KINTAP	1,787	1,813	1,557	1,810
8	TAMBANG ULANG	723	833	728	681
9	BATU AMPAR	1,068	1,179	1,011	1,043
10	BAJUIN	747	838	692	818
11	BUMI MAKMUR	489	599	476	564
TOTAL		13,518	15,007	13,176	14,221

NO	KECAMATAN	USIA		
		35-39 TAHUN	40-44 TAHUN	45-49TAHUN
1	TAKISUNG	1,245	1,416	1,273
2	JORONG	1,471	1,488	1,207
3	PELAIHARI	3,289	3,254	2,954
4	KURAU	539	551	540
5	BATI BATI	1,895	1,989	1,683
6	PANYIPATAN	1,002	1,100	936
7	KINTAP	1,836	1,872	1,542
8	TAMBANG ULANG	771	797	657
9	BATU AMPAR	1,029	1,207	1,048
10	BAJUIN	813	788	708
11	BUMI MAKMUR	560	527	528
TOTAL		14,450	14,989	13,076

DATA PENDUDUK WANITA USIA ≥ 18 TAHUN

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK
1	TAKISUNG	11,929
2	JORONG	11,804
3	PELAIHARI	28,702
4	KURAU	5,182
5	BATI BATI	16,164
6	PANYIPATAN	9,262
7	KINTAP	14,611
8	TAMBANG ULANG	6,594
9	BATU AMPAR	9,935
10	BAJUIN	6,911
11	BUMI MAKMUR	5,040
TOTAL		126,134

DATA REGISTRASI ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	4,977	4,670	9,647
2	JORONG	5,897	5,567	11,464
3	PELAIHARI	12,393	11,606	23,999
4	KURAU	2,141	2,030	4,171
5	BATI BATI	6,973	6,530	13,503
6	PANYIPATAN	3,921	3,658	7,579
7	KINTAP	7,554	7,088	14,642
8	TAMBANG ULANG	2,905	2,804	5,709
9	BATU AMPAR	4,425	4,064	8,489
10	BAJUIN	2,994	2,877	5,871
11	BUMI MAKMUR	2,158	2,063	4,221
TOTAL		56,338	52,957	109,295

DATA KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KIA	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	TAKISUNG	4,374	5,050
2	JORONG	5,174	5,934
3	PELAIHARI	11,900	13,734
4	KURAU	2,376	2,707
5	BATI BATI	6,961	7,474
6	PANYIPATAN	3,709	4,253
7	KINTAP	7,973	8,573
8	TAMBANG ULANG	3,235	3,576
9	BATU AMPAR	4,183	4,654
10	BAJUIN	3,382	3,710
11	BUMI MAKMUR	2,739	2,994
TOTAL		56,006	62,659

Catatan :

* Sumber Data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023



Kepala Dinas,
Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MM., MP
 Pembina Utama Muda / (IV/c)
 NIP. 19680129 199303 1 007



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 2. Bahwa semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten sebelum Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018.
 3. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Tanah Laut.
6. Bidang adalah bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Tanah Laut.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di wilayah

Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Tanah Laut.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kabupaten Tanah Laut pada Dinas .
- (2) Klasifikasi UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tipe B.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD pada dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 4,

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tipe B adalah terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan dengan memberikan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan koordinasi instansi pihak terkait, fasilitasi, mediasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik;
 - b. penyediaan dan/atau fasilitasi layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak setiap tahun mengacu kepada rencana strategis Dinas;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Dinas;
 - d. menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Dinas;
 - e. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Dinas;
 - f. merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ;
 - g. menyelenggarakan urusan program, data, tata usaha (umum, perlengkapan dan kepegawaian), keuangan, aset;
 - h. membina, melaksanakan dan mengawasi program, data, tata usaha, keuangan dan aset;
 - i. menyusun, mengolah dan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset;

- j. melaksanakan kegiatan koordinasi instansi pihak terkait, fasilitasi, mediasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik;
- k. menyediakan dan/atau memfasilitasi layanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang;
- l. melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten, kecamatan, dan desa;
- m. mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya;
- n. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat;
- o. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
- p. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak guna terwujudnya tata kelola UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang baik;
- r. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 8

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan sementara, maka mengusulkan Jabatan Fungsional Senior sebagai Pelaksana Harian (Plh) setelah mendapat persetujuan dinas.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Kelas B adalah jabatan Pengawas/Eselon IV/b.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan nonstruktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (3) Pembiayaan UPTD pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk segera menyesuaikan dengan peraturan Peraturan Bupati ini dengan masa toleransi selama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFRIAL, S.H. M.H.
NIP.197502068 140963 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 5 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. SUKAMTA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN YURUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL S.H. MJI
NIP.19730203 199903 2 006

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. SUKAMTA

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA

a.n Plt. Kepala Dinas P2KBP3A
Sekretaris,



Dwi Anggriani, S. STP
19780313 199612 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

ORGANISASI WANITA KABUPATEN TANAH LAUT

1. Muslimat
2. Fatayat (NU)
3. Alhidayah
4. Himpaudi (Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini)
5. Wanita Islam
6. Aisyiyah (Wanita Muhammadiyah)
7. Persit Kompi
8. Persit Kodim
9. PERIP
10. WIRAWATI CATUR PANCA
11. Bhayangkari
12. PIVERI
13. IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
14. DHARMAYUKTI KARINI
15. HWK (Himpunan Wanita Karya)
16. IGTKI
17. DWP KEMENAG
18. IAD (Ikatan Adhyaksa Darmakarini)
19. PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia)
20. GATRIWARA
21. DWP RUTAN
22. KERTA (Kerukunan Wanita werdatama/Pensiunan ASN)
23. DWP GABUNGAN
24. Harpi Melati
25. IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)
26. IKAPRI (Ikatan Kartini Profesional Indonesia)
27. PPYNI (Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia)
28. WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia)
29. WBI (Wanita Budha Indonesia)

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,



Dwi Anggriani, S. STP
NIP. 19780313 199612 2 001

LAPORAN HASIL KEGIATAN PELATIHAN PEMULASARAN JENAZAH DI 8 KECAMATAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Pelaksanaan perawatan jenazah merupakan kewajiban utama bagi umat muslim yaitu memandikan, mengkafani, mensholati, dan memakamkan sesuai syari'at Islam. Khususnya untuk perawatan jenazah perempuan sangat terbatas sekali yang bisa melakukan perawatan jenazah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan di Kabupaten Tanah Laut maka dilaksanakan pelatihan pemulasaran jenazah di 8 Kecamatan.

2. Tujuan

- a. Memberikan pengetahuan tentang fiqih, pemahaman, tentang perawatan jenazah dan praktek langsung atau pelatihan perawatan jenazah yang sesuai dengan syari'at Islam.
- b. Terbentuknya tenaga sukarelawan perempuan atau kelompok masyarakat perempuan yang siap sewaktu – waktu dibutuhkan untuk melakukan perawatan jenazah perempuan di setiap kecamatan.
- c. Membangun kesadaran dan meningkatkan kapasitas sumber daya kaum perempuan di Kabupaten Tanah Laut baik remaja maupun ibu-ibu terhadap keluarga maupun warga masyarakat di lingkungannya untuk mensegerakan melakukan perawatan jenazah sesuai syari'at Islam.

3. Peserta dan Narasumber

Peserta sosialisasi berjumlah sekitar 30 orang perempuan di setiap Kecamatan yang terdiri dari perwakilan masing-masing desa di setiap kecamatan dengan Narasumber Ustadzah Mariatul Miswariah.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan


Sosialisasi dilaksanakan di 8 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

No	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kecamatan Batu Ampar	16 Februari 2023
2	Kecamatan Jorong	23 Februari 2023
3	Kecamatan Bumi Makmur	09 Maret 2023
4	Kecamatan Bati-Bati	14 Maret 2023
5	Kecamatan Kurau	16 Maret 2023
6	Kecamatan Tambang Ulang	21 Maret 2023
7	Kecamatan Takisung	17 Mei 2023
8	Kecamatan Panyipatan	24 Mei 2023

5. Hasil kegiatan:

- Kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah di 8 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
- Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tanah Laut.
- Acara dibuka oleh Ketua GOW Kabupaten Tanah Laut.

- Ustadzah Mariatul Miswariah memberikan pengetahuan tentang fiqih, pemahaman, tentang perawatan jenazah dan praktek langsung atau pelatihan perawatan jenazah yang sesuai dengan syari'at Islam.
- Materi-materi tersebut disampaikan secara jelas disertai tanya jawab, juga menanyakan kondisi riil di lapangan.
- Setiap teori yang disampaikan disertai dengan praktek langsung oleh para peserta, bagaimana sikap dan apa yang harus dilakukan saat ada orang yang tengah sakaratul maut, saat ada orang yang baru meninggal, juga diajarkan bagaimana cara memotong kain kafan dan menyetuurnya
- Pelatihan kaderisasi perawatan jenazah perempuan telah memberi dampak positif baik bagi masyarakat maupun bagi pribadi-pribadi yang telah dilatih

Pelaihari, 30 Mei 2023
Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan
Perempuan dan Anak

Sumilah, Amd, Keb.
NIP. 197204051993121001

DOKUMENTASI KEGIATAN



DAFTAR HADIR

Kegiatan : PELATIHAN MEMANDIKAN MAYIT

Tempat : KECAMATAN BATU AMPAR

Hari/Tgl : KAMIS, 16 FEBRUARI 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin L/P	Instansi/Organisasi	TANDA TANGAN
1	Errawati	P		1 [Signature]
2	FANNI IMHA DINTY	P		2 [Signature]
3	MUTMALUNAH	P		3 [Signature]
4	TITIK SUMIAT	P		4 [Signature]
5	EMIATI	P		5 [Signature]
6	SRIATUN	P		6 [Signature]
7	Musyallam	P		7 [Signature]
8	Suprayatin	P		8 [Signature]
9	SITI ASIYAH	P		9 [Signature]
10	SETIANI	P		10 [Signature]
11	WISMA NUUMAWATI	P		11 [Signature]
12	RUSTIANI	P		12 [Signature]
13	SITI MURHIDAYAH	P		13 [Signature]
14	khusrul khotimah	P		14 [Signature]
15	Casmiah	P		15 [Signature]
16	DARSIAL	P		16 [Signature]
17	Karsidah	P		17 [Signature]
18	SITI HARYATI	P		18 [Signature]
19	Sunarmi	P		19 [Signature]
20	SRI WIYAH	P		20 [Signature]
21	Mundari Fatmawati	P		21 [Signature]
22	Suharti	P		22 [Signature]
23	Yatni S.Pd	P		23 [Signature]
24	Faridah	P		24 [Signature]
25	Dhani S.Pd	P		25 [Signature]
26	SUNDARI	P		26 [Signature]
27	FATMIAH	P		27 [Signature]
28	Kaita H	P		28 [Signature]
29	Murdal	P		29 [Signature]
30	Kasman	P		30 [Signature]

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pelatihan Memandikan Mayit

Tempat : Kecamatan Jorong

Hari/Tgl : Kamis, 23 Februari 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin L/P	Instansi/Organisasi	TANDA TANGAN
1	Railiyati	P	Desa Asam Jaya	1
2	Rodriyah	P	ASAM JAYA	2
3	MURSIHAH	P	Batalang	3
4	Lisdiana	P	Batalang	4
5	H. Radana	P	Jorong	5
6	Mai Munah	P	Jorong	6
7	Rahmanah Harimah	P	sabuhur	7
8	H. Baibach	P	Jorong	8
9	SEPTI AZATI	P	Swarangan	9
10	I FTahul. Janah	P	Swarangan	10
11	Mariah	P	Jorong	11
12	Hj Norani	P	Jorong	12
13	Mariyatul	P	Jorong	13
14	Raudatul Jannah	P	Jorong	14
15	Wiwit Indriyani	P	Karang Rejo	15
16	ERNA	P	Sei Baru	16
17	Arbainah	P	"	17
18	Mahritha	P	Ds. Atur	18
19	Susi Hariyati	P	Ds. Atur	19
20	SRI KARYAWATI	P	Ds. Menta Agung-Asim	20
21	RUMAH	P	"	21
22	Sri Noto Saupani	P	Ds. Karang Rejo	22
23	ITA FITRIANA	P	Ds. Sabuhur	23
24	Sriyati	P	Ds. Jorong	24
25	Siti Ramlah	P	Ds. Asri Mulya	25
26	MULORSH	P	Ds. Asri Mulya	26
27	Syalmich	P	Jebuhur	27
28	Rusida	P	Atur	28
29	Nunawati	P	- - -	29
30	H. AMINAH	P	- - -	30
31	Puati Dewi F	P	Pengurus GOW	31
32	Lilic Helisah	P	"	32
33	MARIALUL S	P	"	33
34	Salimah	P	"	34
35	Parti	P	"	35
36	Abdul syahid X	L	Prokopim	36
37	Hj. Chusliyah	P	Pengurus GOW	37
38	Yuli Oktavia	P	Ketua GOW	38
39	Endang Thi Wahyuni	P	Relasi hari	39
40	Dian	L	"	40

Yang Menyusun Daftar,

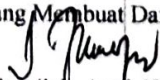
Rudi Ningsyuni, S.Sos
NIP. 19650210 198603 2 020

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pelatihan Memandikan Mayit
Tempat : Kecamatan Bumi Makmur
Hari/Tgl : Kamis, 9 Maret 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin L/P	Instansi/Organisasi	TANDA TANGAN
1	Jhaidah	P	kecamatan	1 Jhaidah
2	Hj. Aibaidah	P	Handil Maluka	2 H.A.
3	Yuliantina	P	Handil Maluka	3 Yuliantina
4	MURSDAH	P	Handil Suruk	4 MURSDAH
5	Nor Zariah	P	HBB	5 Nor Zariah
6	Risiani	P	Handil lobuan emas	6 Risiani
7	Misbah	P	"	7 Misbah
8	Jumiah	P	"	8 Jumiah
9	Lindawati	P	Handil Birayang atas	9 Lindawati
10	Fusmini	P	"	10 Fusmini
11	LATIPAH	P	Handil Suruk	11 LATIPAH
12	RIDAWATI	P	HDL Babirik	12 RIDAWATI
13	Megawati	P	Kutau Utara	13 Megawati
14	Asinawati	P	Kutau Utara	14 Asinawati
15	Misbahul Jannah	P	gei Rusau	15 Misbahul Jannah
16	H. HAMIDAH	D	B. Harapan	16 H. HAMIDAH
17	MASRI FATH	P	B. Harapan	17 MASRI FATH
18	MARLIAT	P	B. Harapan	18 MARLIAT
19	MASRIATI	P	HDL Gayam	19 MASRIATI
20	IRYA RIAH	P	HDL Gayam	20 IRYA RIAH
21	SARIDAH	P	"	21 SARIDAH
22	MAYATI	P	P. HARAPAN	22 MAYATI
23	Rusmidah	P	P. Harapan	23 Rusmidah
24	WARSIH	P	handil Gayam	24 WARSIH
25	Titi Sari	P	HDL Birayang Bawah	25 Titi Sari
26	SURIAH	P	Bumi Harapan	26 SURIAH
27	Mariyah Jamil	P	HDL Babirik	27 Mariyah Jamil
28	sabatih	P	HDL babirik	28 sabatih
29	Mut bayah	P	HDL babirik	29 Mut bayah
30	Shafiqah	P	Bumi Harapan	30 Shafiqah
31	Najibah	P	Bumi Harapan	31 Najibah
32	HAYATI	P	PA HBB	32 HAYATI
33	St. Heksiyah	P	Peluhari	33 St. Heksiyah
34	Vilis Heksiyah	P	"	34 Vilis Heksiyah
35	Hj. Fauziah	P	kecamatan	35 Hj. Fauziah
36	Hj. Marlina	P	Peluhari	36 Hj. Marlina
37	Mariatul	P	"	37 Mariatul
38	Budi Devi	P	"	38 Budi Devi
39	yati oktavia	P	"	39 yati oktavia
40	Sri Haryati	P	Kutau Utara	40 Sri Haryati

Yang Membuat Daftar,


 Sumilah, Amd. Keb

NIP. 19720405 199312 1 001

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pelatihan Memandikan Mayit
Tempat : Kecamatan Bati-Bati
Hari/Tgl : Selasa, 14 Maret 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin LP	Instansi/Organisasi	TANDA TANGAN
1	MOT IANUNAH	P	Banyuwirung	1 Mub
2	Nopsiak	P	Banyuwirung	2 Mub
3	Kadarlah	P	IBERTOR kampung	3 Mub
4	Sundusiah	P	Bestok kampung	4 Mub
5	Lisna	P	Ujung lama	5 Mub
6	Murufi laffah	P	ujung lama	6 Mub
7	Megawati	P	Banua Raya	7 Mub
8	NUR LIAH	P	Banua Raya	8 Mub
9	Enyul S	P	Ciang Anggang	9 Mub
10	Arbinah	P	- - -	10 Mub
11	Misdah	P	Padang	11 Mub
12	Marni	P	Padang	12 Mub
13	Hani	P	Musi indab	13 Mub
14	Ramlah	P	Bati-Bati	14 Mub
15	NUR HIKMAH	P	Bati-Bati	15 Mub
16	Lilis Suryati	P	Kait Baru	16 Mub
17	Sriyani	P	kait Baru	17 Mub
18	Naila	P	Protocol	18 Mub
19	binh An Nurh	P	Kait Kait	19 Mub
20	Winarti Paramitha	P	Kait-Kait	20 Mub
21	MARMIYAH	P	Sambangam	21 Mub
22	Inac	P	sambangam	22 Mub
23	Noer Mada	P	PANDAHAN	23 Mub
24	CARIFAH	P	PANDAHAN	24 Mub
25	Rusdunawati	P	Ciang Anggang	25 Mub
26	ASLINA	P	UBR	26 Mub
27	AVITLIA Agatha	P	UBR	27 Mub
28	Helinda	P	Kecamatan	28 Mub
29	Gri Wahyuni	P	KOTA TP PKC Koc	29 Mub
30	Nia Rahmasari	P	Pelatihari	30 Mub
31	Mariatul Muwarid	P	Narsum	31 Mub
32	Hj. Marlisa	P	Pelatihari	32 Mub
33	yati Oletaviana	P	Pelatihari	33 Mub
34	Amasriah	P	Banyuwirung	34 Mub
35	Mariatul S	P	Bental Darat	35 Mub
36	Amirah	P	Kait Kait	36 Mub
37	PARIDIAH	P	PTW DIT HUK	37 Mub
38	Iainah	P	ujung baru	38 Mub
39	Rizki Nadi M	L	DKPim	39 Mub
40	Supran	L	DKPim	40 Mub

Yang Membuat Daftar,


 Sumilah Amd Keb

NIP. 19720405 199312 1 001

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pelatihan Memandikan Mayit
 Tempat : Kecamatan Kurau
 Hari/Tgl : Kamis, 16 Maret 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin LP	Instansi/Organisasi	TANDA TANGAN
1	Safnah		Padang Luas	1 Saaf
2	Rosyida		Padang Luas	2 Rps
3	Mariatu Jannah		Padang Luas	3 Mj
4	Fatimah		Padang Luas	4 F
5	HERMI.H		MALUKA BAWLIT	5 HR
6	RAHIMAH		MALUKA BAWLIT	6 R
7	ARBAH		HANDIL NEGARA	7 AR
8	FITRIYANTI		DS. SARIKANDI	8 F
9	NUB HALISAH		DS SARIKANDI	9 N
10	MELIANI		Ds. Tambak Karya	10 M
11	PATMAWATI		DS. Tambak Karya	11 P
12	Siti Fardah		Ds. Kurau	12 SF
13	Nor Moya Sari		Ds. Kurau	13 NM
14	Hammawati		Ds. Kurau	14 H
15	Rina Anggrani		Ds. Kurau	15 R
16	Mohrika		Ds. Radem	16 M
17	Aminah		Ds. Radem	17 A
18	Yulia		Ds. Kali besar	18 Y
19	Husniah		Ds Kali besar	19 H
20	Mardiana		Ds. TBK - sarinah	20 M
21	Jamiah		Ds. TBK - sarinah	21 J
22	Taibah		Ds. TBK Sarinah	22 T
23	Rusita .P		P. Luas	23 R
24	Karina .S		Padang Luas	24 K
25	Rahmah		Padang Luas	25 R
26	Rahmah		Padang Luas	26 R
27	Masliam		Handil Negara	27 M
28	Sari		Handil Negara	28 S
29	Masriah		Handil Negara	29 M
30	Supiah		"	30 S
31	Lilis Kalisul		Pelatihari	31 L
32	Mariatul Musowid		Xarom	32 M
33	Mariatul .S		Pelatihari	33 M
34	Hj. Marlina		"	34 M
35	Ferry L		Humas Lela	35 F
36	Fendah Teri Wahyuni		Pelatihari	36 F
37	Jannah		pelatihari	37 J
38	Rahyana		pelatihari	38 R
39	Siti Hadiyah		Pelatihari	39 S
40	Nia Rahmasari		Pelatihari	40 N

Yang Membuat Daftar,

Sumilah Amd Keb

NIP. 19720405 199312 1 001

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pelatihan Memandikan Mayit
Tempat : Kecamatan Tambang Ulang
Hari/Tgl : Selasa, 21 Maret 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin L/P	Instansi/Organisasi	TANDA TANGAN
1	Janiab	P	Kayu Abang	1
2	Rusdayati		kayu abang	2
3	Halimatul Sediqah	P	Kayu ABANG	3
4	Winarti	P	kayu abang	4
5	Hj. Arrah	P	Pulau Sari	5
6	Armizah		Plasma pulau Sari	6
7	Yulis		" " "	7
8	Wahidah	P	Tambang Ulang	8
9	Tulaidah		pulau sari	9
10	St. Halimah	P	Sungai pany	10
11	Ida	P	" " "	11
12	Rizah	P	" " "	12
13	Kumalasari	P	" " "	13
14	MAS Kencana	P	" " "	14
15	Bayah	P	" " "	15
16	SUKARMI	P	MATADAH BARU	16
17	ESTI	P	" " "	17
18	KETI	P	" " "	18
19	Ardawati	P	Tambang Ulang	19
20	FIYANA A	P	Tambang - ulang	20
21	Masita		Pulau sari	21
22	Misrah	P	Gunung Raja	22
23	Siti janyah	P	Gunung Raja	23
24	Jahriah	P	Gunung Raja	24
25	HERLETA ANGGRAINI	P	BINGKULU	25
26	Sunarti	P	Bangkulu	26
27	FITRIANI	P	bingkulu	27
28	Rohani	P	Bingkulu	28
29	Rini Id	P	Bingkulu	29
30	Roslanaty	P	Pulau Sari	30
31	Dni Anggraini	P	Sungai Telai	31
32	Subarni	P	" " "	32
33	Rismawati	P	" " "	33
34	St. Halimah	P	Pelachari	34
35	Manichul Sidiqah	P	" " "	35
36	Hj. Marliana	P	" " "	36
37	Lilis Halimah	P	" " "	37
38	Yati Aleviana	P	" " "	38
39	Xia Ratnasari	P	" " "	39
40	Manichul Misrawiah	P	" " "	40

Yang Membuat Daftar,

(Signature)

Sumulah, Amd. Keb

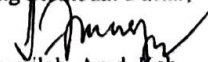
NIP. 19720405 199312 1 001

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pelatihan Memandikan Mayit
Tempat : Kecamatan Takisung
Hari/Tgl : Rabu, 17 Mei 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin L/P	Instansi/Organisasi	TANDA TANGAN
1	Rina Hifiana	P	Rangang Dalam RT 3	1 [Signature]
2	FARIDAH ARIYANI	P	" "	2 [Signature]
3	MOTR Jahah	P	Sumber Makmur	3 [Signature]
4	QNI Azzahri	P	" "	4 [Signature]
5	Raudah	P	Kuala Tambangan	5 [Signature]
6	Rahminawati	P	" "	6 [Signature]
7	MUliming	P	Pagatan Besar	7 [Signature]
8	Sailanah	P	" "	8 [Signature]
9	ZALAMIA	P	TAKISUNG	9 [Signature]
10	Jatiah	P	TAKISUNG	10 [Signature]
11	mariah	P	T. Langsat	11 [Signature]
12	Purhimah	P	T. Langsat	12 [Signature]
13	AIDA	P	Tabano	13 [Signature]
14	Siti berjanah	P	Benua Tengah	14 [Signature]
15	Masiana	P	Tabanus	15 [Signature]
16	Salsamah	P	Benua Tengah	16 [Signature]
17	Siti NORMAKIYAH	P	DESA Benua Lawas	17 [Signature]
18	Salmah	P	Ranggang	18 [Signature]
19	ASYAH	P	Benua lawas	19 [Signature]
20	BULNah	P	Ranggang	20 [Signature]
21	Arbayah	P	Batilai	21 [Signature]
22	HANISAH	P	Batilai	22 [Signature]
23	Hi SUPIAH	P	Gunung Makmur	23 [Signature]
24	SITI ARIAH	P	Gunung Makmur	24 [Signature]
25	Salahah	P	Gunung Makmur	25 [Signature]
26	Jani Marlina	P	Gunung Makmur	26 [Signature]
27	Ida Rahmawati	P	Gunung Makmur	27 [Signature]
28	Sri Sethe	P	" "	28 [Signature]
29	APR Nur Anita	P	" "	29 [Signature]
30	Maryamah	P	Batilai	30 [Signature]
31	Yati Oktoviana	P	Pelatihari	31 [Signature]
32	Siti Harkjah	P	" "	32 [Signature]
33	Salamah	P	" "	33 [Signature]
34	Bubi Dewi S	P	" "	34 [Signature]
35	Lilis Khalidel	P	" "	35 [Signature]
36	Eudak	P	" "	36 [Signature]
37	Mariahtul Musadariah	P	" "	37 [Signature]
38	Syamsuri	P	Takisung	38 [Signature]
39	Agur	L	" "	39 [Signature]
40	Tyar	P	" "	40 [Signature]

Yang Membuat Daftar,


 Sumilah, Amd. Keb

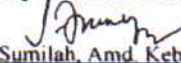
NIP. 19720405 199312 1 001

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pelatihan Memandikan Mayit
Tempat : Kecamatan Panyipatan
Hari/Tgl : Rabu, 24 Mei 2023

NO	NAMA	Jenis Kelamin LP	Instansi/Organisasi	TANDA TANGAN
1	FATIMAH	P	DESA Tanjung Dewa	1
2	ASNAH	P	DESA Tanjung Dewa	2
3	SUSILAWATI	P	DESA BATU MULYA	3
4	LILIS FARIDAH	P	DESA BATU MULYA	4
5	Siti Nurwahidah	P	Desa Batu Mulya	5
6	MARIA UFAH	P	DESA Panyipatan	6
7	Mukhammadah	P	DESA Panyipatan	7
8	Hilozumaryati	P	DESA Panyipatan	8
9	DARSIAH		BATAKANI	9
10	Zilva Socharini		BATAKANI	10
11	sm luminta		BATAKANI	11
12	Syarifah Riharah		Batu tungku	12
13	Rajih		Batu tungku	13
14	NORJANNAN	P	BATAKANI	14
15	Darsini		SUKARAMAH	15
16	Suyati		SUKARAMAH	16
17	Sutarwi		SUKARAMAH	17
18	Gulastri		Bumi Asih	18
19	Suntian		Bumi Asih	19
20	Puatri		BUMI ASIH	20
21	Sumiah		- u -	21
22	Manawah		- u -	22
23	PUSPO LINA		Bumi Asih	23
24	Siti Aminah		Kandungan lama	24
25	Norma Yunita		kandungan lama	25
26	ASTATI		kandungan lama	26
27	NORJEVAH		tanjung dewa	27
28	ALITA		KANDANGAN BARU	28
29	Juwati		Kandungan baru	29
30	Wahidah		Kandungan baru	30
31	Yati Oktoviana		Pelatihari	31
32	Euse W		- " -	32
33	Lilis Kelipah		- " -	33
34	Salamat		- " -	34
35	Nia Rahmasari		- " -	35
36	H. Marlyana		- " -	36
37	Mariatul Saifiah		- " -	37
38	Bria Dewi		- " -	38
39	Mariatul Misrawiah		- " -	39
40	Hj. Mariati		Pelatihari	40

Yang Membuat Daftar,


 Sumilah Amd Keb
 NIP. 19720405 199312 1 001

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
 SESUAI ASLINYA
 a.n Plt. Kepala Dinas P2KBP3A
 Sekretaris,



Dwi Anggriani, S. STP
 19780313 199612 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

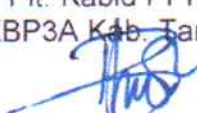
LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2023

1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan adalah Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Gabungan Istri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kabupaten Tanah Laut.
2. Kegiatan pembinaan organisasi wanita seminar kecantikan skin quality dihadiri oleh 100 peserta dari organisasi wanita di kabupaten tanah laut dengan narasumber dr. Dita Yuliasari, Dipl, AAAM dari Devanka Aesthetic Clinic.
3. Kegiatan pembinaan organisasi wanita seminar parenting "pentingnya invest-Asi dalam mencegah stunting" dihadiri oleh 100 peserta dari organisasi wanita di kabupaten tanah laut dengan narasumber Dina Aprilia, M.Psi, Psikolog.
4. Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita Pelatihan Pemulasaran Jenazah tahun 2023 di 8 Kecamatan (Panyipatan, Takisung, Tambang Ulang, Jorong, Bumi Makmur, Kurau, Kintap, Bajuin) dihadiri oleh 30 peserta perempuan dengan narasumber ustadzah Mariatul Miswariah.
5. Pelatihan industri rumahan pembuatan kain sasirangan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga di Desa Ujung Batu, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Batu Ampar dihadiri oleh masing-masing 30 orang peserta perempuan dengan narasumber dari Fanesa Sasirangan.
6. Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita Pelatihan Pembuatan Tudung Saji tahun 2023 dihadiri oleh 50 peserta anggota DWP
7. Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita Pelatihan Pembuatan Kue Kering tahun 2023 dihadiri oleh 50 peserta anggota DWP
8. Kegiatan pembelajaran dan pengembangan wawasan organisasi wanita ke pusat umkm binaan Diskoperindag dan Dekranasda Kota Jakarta Pusat.
9. Kegiatan bimbingan teknis pengarusutamaan gender (PUG) dan pelatihan penganggaran responsive gender (PPRG) dihadiri oleh 30 SKPD se Kabupaten Tanah Laut dengan narasumber dari Inspektorat Kab. Tanah Laut, BAPPEDA Kab. Tanah Laut, Fasilitator PUG Prov. Kalimantan Selatan, dan Kementerian PPPA RI.

Pelaihari, 05 Februari 2024


Membuat laporan,

Plt. Kabid PPPA
DP2KBP3A Kab. Tanah Laut


Pahimah, SKM, M.Kes
NIP. 19740404 199903 2 012

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,


Dwi Anggriani, S. STP
NIP. 19780313 199612 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

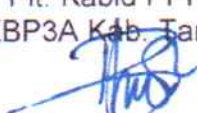
LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2023

1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan adalah Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Gabungan Istri Wakil Rakyat (GATRIWARA) Kabupaten Tanah Laut.
2. Kegiatan pembinaan organisasi wanita seminar kecantikan skin quality dihadiri oleh 100 peserta dari organisasi wanita di kabupaten tanah laut dengan narasumber dr. Dita Yuliasari, Dipl, AAAM dari Devanka Aesthetic Clinic.
3. Kegiatan pembinaan organisasi wanita seminar parenting "pentingnya invest-Asi dalam mencegah stunting" dihadiri oleh 100 peserta dari organisasi wanita di kabupaten tanah laut dengan narasumber Dina Aprilia, M.Psi, Psikolog.
4. Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita Pelatihan Pemulasaran Jenazah tahun 2023 di 8 Kecamatan (Panyipatan, Takisung, Tambang Ulang, Jorong, Bumi Makmur, Kurau, Kintap, Bajuin) dihadiri oleh 30 peserta perempuan dengan narasumber ustadzah Mariatul Miswariah.
5. Pelatihan industri rumahan pembuatan kain sasirangan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga di Desa Ujung Batu, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Batu Ampar dihadiri oleh masing-masing 30 orang peserta perempuan dengan narasumber dari Fanesa Sasirangan.
6. Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita Pelatihan Pembuatan Tudung Saji tahun 2023 dihadiri oleh 50 peserta anggota DWP
7. Kegiatan Pembinaan Organisasi Wanita Pelatihan Pembuatan Kue Kering tahun 2023 dihadiri oleh 50 peserta anggota DWP
8. Kegiatan pembelajaran dan pengembangan wawasan organisasi wanita ke pusat umkm binaan Diskoperindag dan Dekranasda Kota Jakarta Pusat.
9. Kegiatan bimbingan teknis pengarusutamaan gender (PUG) dan pelatihan penganggaran responsive gender (PPRG) dihadiri oleh 30 SKPD se Kabupaten Tanah Laut dengan narasumber dari Inspektorat Kab. Tanah Laut, BAPPEDA Kab. Tanah Laut, Fasilitator PUG Prov. Kalimantan Selatan, dan Kementerian PPPA RI.

Pelaihari, 05 Februari 2024

Membuat laporan,

Plt. Kabid PPPA
DP2KBP3A Kab. Tanah Laut


Pahimah, SKM, M.Kes
NIP. 19740404 199903 2 012

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,


Dwi Anggriani, S. STP
NIP. 19780313 199612 2 001





SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 2. bahwa semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten sebelum Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018.
 3. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 34 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN SUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
Alfiral
ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19730203 199903 2 006

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd.
H. SUKANTA





BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/788 -KUM/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA (SHELTER)
KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT

- Menimbang** :
- a. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perempuan dan anak korban kekerasan perlu mendapat perlindungan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera dan terpadu, salah satunya adalah penempatan anak dirumah perlindungan sementara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*) Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

d. menjaga kebersihan Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*).

2. Tugas Staf Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*) :
 - a. melaksanakan, memproses, mengolah administrasi, mencatat, mendistribusikan serta mengarsip seluruh dokumen dengan tertib;
 - b. membuat catatan harian perkembangan korban perempuan dan anak;
 - c. membuat laporan secara periode tentang perkembangan kasus perempuan dan anak kepada atasan; dan
 - d. menyusun laporan secara periode dengan baik.
3. Tugas Operator Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*) :
 - a. menerima laporan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui alat komunikasi;
 - b. menyampaikan laporan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada atasan; dan
 - c. menjemput atau mengantar korban tindak kekerasan perempuan dan anak untuk mendapat penanganan.
4. Tugas Penjaga Malam Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*) :
 - a. menjaga keamanan Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*);
 - b. mengawasi Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*) dari gangguan luar; dan
 - c. melaporkan kepada atasan bila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan korban perempuan dan anak di Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*).
5. Tugas Psikolog :
Menganalisa perilaku korban untuk memahami karakter korban dalam rangka penanganan pemulihan kondisi korban.
6. Tugas Psikiater :
Memberikan konsultasi seputar kesehatan jiwa.

KEEMPAT : Penunjukan dan Penetapan Pengelola Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*), Staf Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*), Operator Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*), Penjaga Malam Rumah Perlindungan Sementara (*Shelter*), Psikolog dan Psikiater di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

3) IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$ $\frac{21}{126.134} \times 100\%$ $0,012$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan adalah jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial.▪ Jumlah penduduk Perempuan di provinsi adalah jumlah keseluruhan Perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di kabupaten/kota.

Pelaihari, 23 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas,


DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk. (IV/b)
NIP. 19780313 190612 2 001

DAFTAR JUMLAH KLIEN KASUS PEREMPUAN DI UPTD PPA KABUPATEN TANAH LAUT
PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2023

NO	JUMLAH KLIEN	JUMLAH PELAPORAN/RUJUKAN					DI RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA	KASUS/KLIEN SELESAI	ASAL KLIEN (Wilayah Kecamatan)
		UPPA POLRES	SATPOL PP	DATANG SENDIRI	MASYARAKAT	LAINNYA			
1	21	4	2	13	0	2	0	11	Pelaihari, Takisung, Bajuin, Kurau, Tambang Ulang, Panyipatan, Jorong, Bumi Makmur


Mengetahui,

 Ptt. Kepala Dinas



DWI ANGGRIANI, S.STP
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19780313 199612 2 001

Pelaihari, 23 Januari 2024
 Kepala UPTD Perlindungan
 Perempuan dan Anak



PAHIMAH, SKM, M.Kes
 Pembina (IVa)
 NIP. 19740404 199903 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com


DAFTAR KASUS PEREMPUAN DI UPTD PPA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2023


NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAPORAN	JENIS KASUS	ALAMAT	RUJUKAN DARI	TINDAK LANJUT
1	Kec. Bajuin	26 Januari 2023	Perebutan hak asuh anak	Ds. Tanjung Kec. Bajuin	Datang sendiri	Koordinasi, mediasi
2	Kec. Takisung	31 Januari 2023	RT tidak harmonis	Ds. Benua Tengah Kec. Takisung	Datang sendiri	Konsultasi
3	Kec. Pelaihari	08 Februari 2023	Kekerasan Psikis dalam RT	Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Pemeriksaan Psikologis
4	Kec. Bajuin	16 Februari 2023	Perebutan hak asuh anak	Ds. Tanjung Kec. Bajuin	Datang sendiri	Konsultasi
5	Kec. Pelaihari	09 Maret 2023	KDRT dan Kekerasan Psikis	Ds. Panggung Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tala	Pemeriksaan Psikologis
6	Kec. Pelaihari	10 Mei 2023	Kekerasan Psikis	Kab. Balangan (Kost Kec. Pelaihari)	Datang sendiri	Pemeriksaan Psikologis
7	Kec. Bumi Makmur	07 Juni 2023	Diduga terlantar	Ds. Kurau Utara Kec. Bumi Makmur	Dinas Sosial	Pemulangan
8	Kec. Kurau	13 Juni 2023	Perebutan hak asuh anak	Ds. Padang Luas Kec. Kurau	Datang sendiri	Koordinasi, mediasi
9	Kec. Pelaihari	22 Juni 2023	Perebutan hak asuh anak	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Koordinasi, mediasi
10	Kec. Tambang Ulang	04 Juli 2023	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Ds. Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Datang sendiri	Konsultasi, pendampingan

11	Kec. Panyipatan	06 Juli 2023	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Ds. Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	UPPA Polres Tala	Konsultasi, pendampingan
12	Kec. Pelaihari	15 Agustus 2023	Perebutan hak asuh anak	Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Konsultasi
13	Kec. Pelaihari	18 Agustus 2023	Dugaan Penganiayaan oleh Pacar	Yogyakarta / Kost Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Pemeriksaan Psikologis
14	Kec. Pelaihari	21 Agustus 2023	Pesta minuman keras dan suka sesama jenis	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis dan Pemulangan
15	Kec. Pelaihari	05 Oktober 2023	Kekerasan Verbal/ Psikis	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Pemeriksaan Psikologis
16	Kec. Pelaihari	06 Oktober 2023	Prostitusi Online	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis
17	Kec. Pelaihari	11 Oktober 2023	KDRT	Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Pendampingan Mediasi
18	Kec. Pelaihari	30 Oktober 2023	Perebutan hak asuh anak	Ds. Ujung Batu Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Konsultasi
19	Kec. Pelaihari	02 Nopember 2023	KDRT	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	UPTD PPA Kota Bjm	Penjangkauan
20	Kec. Jorong	19 Desember 2023	Pelecehan Seksual/Pencabulan	Ds. Swarangan Kec. Jorong	UPPA Polres Tala	Pemeriksaan Psikologis
21	Kec. Kurau	19 Desember 2023	Pelecehan Seksual/Pencabulan	Ds. Tambak Karya Kec. Kurau	UPPA Polres Tala	Pemeriksaan Psikologis

Mengetahui,
Kep. Plt. Kepala Dinas


DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001

Pelaihari, 23 Januari 2024
Kepala UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak


PAHIMAH, SKM, M.Kes
Pembina (IVa)
NIP. 19740404 199903 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

Pelaihari, 22 Januari 2024

Nomor : 400.12.4.4/071/Disdukcapil/I/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Data Penduduk

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut

di –

Pelaihari

Menghubung surat Nomor : 100.1.7/31/I/2024/DP2KBP3A tanggal 09 Januari 2024 Perihal Permintaan Data, terlampir kami sampaikan Data Kependudukan sesuai format yang diminta dengan sumber data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007

**DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

DATA PENDUDUK PER KECAMATAN PER JENIS KELAMIN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	17,136	16,599	33,735
2	JORONG	18,360	17,371	35,731
3	PELAIHARI	40,926	40,308	81,234
4	KURAU	7,311	7,212	14,523
5	BATI BATI	23,501	22,694	46,195
6	PANYIPATAN	13,143	12,920	26,063
7	KINTAP	22,864	21,699	44,563
8	TAMBANG ULANG	9,666	9,398	19,064
9	BATU AMPAR	14,678	13,999	28,677
10	BAJUIN	10,197	9,788	19,985
11	BUMI MAKMUR	7,244	7,103	14,347
TOTAL		185,026	179,091	364,117

DATA PENDUDUK WANITA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

NO	KECAMATAN	USIA			
		15-19 TAHUN	20-24 TAHUN	25-29 TAHUN	30-34 TAHUN
1	TAKISUNG	1,177	1,429	1,167	1,241
2	JORONG	1,306	1,442	1,319	1,443
3	PELAIHARI	2,962	3,275	3,032	3,256
4	KURAU	569	626	491	592
5	BATI BATI	1,738	1,904	1,747	1,785
6	PANYIPATAN	952	1,069	956	988
7	KINTAP	1,787	1,813	1,557	1,810
8	TAMBANG ULANG	723	833	728	681
9	BATU AMPAR	1,068	1,179	1,011	1,043
10	BAJUIN	747	838	692	818
11	BUMI MAKMUR	489	599	476	564
TOTAL		13,518	15,007	13,176	14,221

NO	KECAMATAN	USIA		
		35-39 TAHUN	40-44 TAHUN	45-49TAHUN
1	TAKISUNG	1,245	1,416	1,273
2	JORONG	1,471	1,488	1,207
3	PELAIHARI	3,289	3,254	2,954
4	KURAU	539	551	540
5	BATI BATI	1,895	1,989	1,683
6	PANYIPATAN	1,002	1,100	936
7	KINTAP	1,836	1,872	1,542
8	TAMBANG ULANG	771	797	657
9	BATU AMPAR	1,029	1,207	1,048
10	BAJUIN	813	788	708
11	BUMI MAKMUR	560	527	528
TOTAL		14,450	14,989	13,076

DATA PENDUDUK WANITA USIA ≥ 18 TAHUN

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK
1	TAKISUNG	11,929
2	JORONG	11,804
3	PELAIHARI	28,702
4	KURAU	5,182
5	BATI BATI	16,164
6	PANYIPATAN	9,262
7	KINTAP	14,611
8	TAMBANG ULANG	6,594
9	BATU AMPAR	9,935
10	BAJUIN	6,911
11	BUMI MAKMUR	5,040
TOTAL		126,134

DATA REGISTRASI ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	4,977	4,670	9,647
2	JORONG	5,897	5,567	11,464
3	PELAIHARI	12,393	11,606	23,999
4	KURAU	2,141	2,030	4,171
5	BATI BATI	6,973	6,530	13,503
6	PANYIPATAN	3,921	3,658	7,579
7	KINTAP	7,554	7,088	14,642
8	TAMBANG ULANG	2,905	2,804	5,709
9	BATU AMPAR	4,425	4,064	8,489
10	BAJUIN	2,994	2,877	5,871
11	BUMI MAKMUR	2,158	2,063	4,221
TOTAL		56,338	52,957	109,295

DATA KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KIA	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	TAKISUNG	4,374	5,050
2	JORONG	5,174	5,934
3	PELAIHARI	11,900	13,734
4	KURAU	2,376	2,707
5	BATI BATI	6,961	7,474
6	PANYIPATAN	3,709	4,253
7	KINTAP	7,973	8,573
8	TAMBANG ULANG	3,235	3,576
9	BATU AMPAR	4,183	4,654
10	BAJUIN	3,382	3,710
11	BUMI MAKMUR	2,739	2,994
TOTAL		56,006	62,659

Catatan :

* Sumber Data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023



Kepala Dinas,
Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MM., MP
 Pembina Utama Muda / (IV/c)
 NIP. 19680129 199303 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

LAPORAN AKHIR

**GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
Kabupaten Tanah Laut**

2020 - 2035

**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Jl. A.Syarani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut
Telp. (0512) 22855

**MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN
SELURUH WANITA UMUR 25-49 TAHUN
TAHUN 2023**

Kelompok Umur Wanita	Jumlah Penduduk Wanita	Jumlah Kawin	Jumlah Belum Kawin	%
10-14 TH	14159	7	14152	99,95
15-19 TH	13316	370	12946	97,22
20-24 TH	12240	3851	8389	68,54
25-29 TH	10905	8136	2769	25,39
30-34 TH	12402	11112	1290	10,40
35-39 TH	12773	11754	1019	7,98
40-44 TH	13319	12044	1275	9,57
45-49 TH	11650	10084	1566	13,44
Jumlah	100764	57358	43406	332,49

Sumber :

1. Jumlah Kelahiran (Diolah)
2. Jumlah Penduduk Wanita : Hasil PK 2023 dari data Siga 2023 (Desember) / Tanah laut dalam angka 2023

Keterangan :

$$\begin{aligned}
 UKP &= 10 + 1 (99,95 - 13,44) \times (5 \times 332,49) - (49 - 10) \times 13,44 \\
 &= 10 + 1 / 86,51 \times (1540 - 524,16) \\
 &= 10 + 0,01 \times 1016 \\
 &= 10 + 10,16 = 20,16
 \end{aligned}$$

A.n Plt. Kepala Dinas

Sekretaris



DWI ANGGRIANI, S.STP

Pembina Tk.I(IV/b)

NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1) IKK Outcome : TFR (Angka Kelahiran Total)

Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Rumus	:	$TFR = 5 \sum_{i=1}^{i=7} ASFRi$ $ASFRi = \frac{b_i}{p_i} \times 1000$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>
Keterangan	:	▪ Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) adalah hasil perhitungan rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun).



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

AGE SPESIFIK FERTILITY RATE (ASFR)

Kelompok Umur Wanita	Jumlah Penduduk Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4) = (3):(2) x 1.000	(5)
15 – 19 Tahun	13,518	431	31.88	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times 1000$
20 – 24 Tahun	15,007	1,494	99.55	
25 – 29 Tahun	13,176	1,671	126.82	
30 – 34 Tahun	14,221	1,206	84.80	
35 – 39 Tahun	14,450	707	48.93	
40 – 44 Tahun	19,989	210	10.51	
45 – 49 Tahun	13,076	14	1.07	
Jumlah	103,437	5,733	403.57	

Sumber :

1. Jumlah Kelahiran Tahun 2023 (Diolah)
2. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Tanah Laut PK 2023
3. Angka Hasil Pembulatan

TOTAL FERTILITY RATE (TFR)

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^{i=7} ASFR_i$$

$$TFR = 5 \times (31,88 + 99,55 + 126,55 + 84,80 + 48,93 + 10,51 + 1,07)$$

$$TFR = 5 \times 407,57$$

$$TFR = 2.037 \text{ per } 1.000 \text{ penduduk usia } 15\text{-}49 \text{ tahun}$$

$$TFR = 2,04 \text{ anak untuk setiap wanita usia } 15\text{-}19 \text{ tahun}$$

Pelaihari, 23 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas,



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

Pelaihari, 22 Januari 2024

Nomor : 400.12.4.4/071/Disdukcapil/I/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Data Penduduk

Kepada Yth,


Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut

di –

Pelaihari

Menghubung surat Nomor : 100.1.7/31/I/2024/DP2KBP3A tanggal 09 Januari 2024 Perihal Permintaan Data, terlampir kami sampaikan Data Kependudukan sesuai format yang diminta dengan sumber data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007

**DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

DATA PENDUDUK PER KECAMATAN PER JENIS KELAMIN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	17,136	16,599	33,735
2	JORONG	18,360	17,371	35,731
3	PELAIHARI	40,926	40,308	81,234
4	KURAU	7,311	7,212	14,523
5	BATI BATI	23,501	22,694	46,195
6	PANYIPATAN	13,143	12,920	26,063
7	KINTAP	22,864	21,699	44,563
8	TAMBANG ULANG	9,666	9,398	19,064
9	BATU AMPAR	14,678	13,999	28,677
10	BAJUIN	10,197	9,788	19,985
11	BUMI MAKMUR	7,244	7,103	14,347
TOTAL		185,026	179,091	364,117

DATA PENDUDUK WANITA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

NO	KECAMATAN	USIA			
		15-19 TAHUN	20-24 TAHUN	25-29 TAHUN	30-34 TAHUN
1	TAKISUNG	1,177	1,429	1,167	1,241
2	JORONG	1,306	1,442	1,319	1,443
3	PELAIHARI	2,962	3,275	3,032	3,256
4	KURAU	569	626	491	592
5	BATI BATI	1,738	1,904	1,747	1,785
6	PANYIPATAN	952	1,069	956	988
7	KINTAP	1,787	1,813	1,557	1,810
8	TAMBANG ULANG	723	833	728	681
9	BATU AMPAR	1,068	1,179	1,011	1,043
10	BAJUIN	747	838	692	818
11	BUMI MAKMUR	489	599	476	564
TOTAL		13,518	15,007	13,176	14,221

NO	KECAMATAN	USIA		
		35-39 TAHUN	40-44 TAHUN	45-49TAHUN
1	TAKISUNG	1,245	1,416	1,273
2	JORONG	1,471	1,488	1,207
3	PELAIHARI	3,289	3,254	2,954
4	KURAU	539	551	540
5	BATI BATI	1,895	1,989	1,683
6	PANYIPATAN	1,002	1,100	936
7	KINTAP	1,836	1,872	1,542
8	TAMBANG ULANG	771	797	657
9	BATU AMPAR	1,029	1,207	1,048
10	BAJUIN	813	788	708
11	BUMI MAKMUR	560	527	528
TOTAL		14,450	14,989	13,076

DATA PENDUDUK WANITA USIA ≥ 18 TAHUN

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK
1	TAKISUNG	11,929
2	JORONG	11,804
3	PELAIHARI	28,702
4	KURAU	5,182
5	BATI BATI	16,164
6	PANYIPATAN	9,262
7	KINTAP	14,611
8	TAMBANG ULANG	6,594
9	BATU AMPAR	9,935
10	BAJUIN	6,911
11	BUMI MAKMUR	5,040
TOTAL		126,134

DATA REGISTRASI ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	4,977	4,670	9,647
2	JORONG	5,897	5,567	11,464
3	PELAIHARI	12,393	11,606	23,999
4	KURAU	2,141	2,030	4,171
5	BATI BATI	6,973	6,530	13,503
6	PANYIPATAN	3,921	3,658	7,579
7	KINTAP	7,554	7,088	14,642
8	TAMBANG ULANG	2,905	2,804	5,709
9	BATU AMPAR	4,425	4,064	8,489
10	BAJUIN	2,994	2,877	5,871
11	BUMI MAKMUR	2,158	2,063	4,221
TOTAL		56,338	52,957	109,295

DATA KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KIA	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	TAKISUNG	4,374	5,050
2	JORONG	5,174	5,934
3	PELAIHARI	11,900	13,734
4	KURAU	2,376	2,707
5	BATI BATI	6,961	7,474
6	PANYIPATAN	3,709	4,253
7	KINTAP	7,973	8,573
8	TAMBANG ULANG	3,235	3,576
9	BATU AMPAR	4,183	4,654
10	BAJUIN	3,382	3,710
11	BUMI MAKMUR	2,739	2,994
TOTAL		56,006	62,659

Catatan :

* Sumber Data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023



Kepala Dinas,
Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MM., MP
 Pembina Utama Muda / (IV/c)
 NIP. 19680129 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
 Email : dinas2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 6

JUMLAH KELUARGA YANG TERPAPAR PESAN/INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

PERIODE : s.d 2023
 WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA MENURUT KE TERPAPARAN (MENCERAIKAN/INDIGAD/ MELALUI PESAN/INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA)		SUMBER MEDIA						
		YA	TIDAK	KORAN/MAJALAH/ TABLOID	TELEVISI/RADIO / VIDEO/REKON	FACEBOOK/INSTAGRAM / TWITTER/WHATSAPP/ YOUTUBE/ALGO/WEBSITE	SEMINAR/PERDAJUAN/IGADAT/ MOHR/BUKUS/BERKAS/ PERTUMBUHAN KELUARGA/ KEGIATAN/SH/SELING/ PAMERAN	LEAFLET/LEMBAR BAIK/ POSTER/STAND/BERBENTUK/ IN/UMID/ BUNDE/ LAMPAK/BUK/BERAS/ BAHU/MURAL/DOVER	PAYUNG/ANAK/PEKAT/ BUDAYA LOKAL	
01	TAKSUNG	6.238	3.280	276	5.347	2.471	377	492	5	
02	JORONG	5.664	3.003	406	4.026	3.608	637	54	17	
03	PELAIHARI	17.215	3.493	2.696	15.600	8.869	2.562	2.405	28	
04	KURAU	2.351	1.839	73	2.214	219	232	361	0	
05	BATI BATI	7.691	4.137	1.216	6.402	3.967	1.936	1.004	22	
06	PANYIPATAN	5.415	2.019	23	4.395	2.372	1.136	379	4	
07	KINTAP	8.045	2.328	511	6.504	4.162	360	141	7	
08	TAMBANG ULANG	4.008	1.597	120	2.922	2.294	704	679	1	
09	BATU AMPAR	6.277	2.467	156	4.662	1.626	498	234	0	
10	BAJUIN	3.546	1.656	123	2.767	1.038	989	1.279	1	
11	BUMI MAKMUR	3.395	816	181	3.026	1.114	181	305	2	
JUMLAH TOTAL		99.136	25.632	5.763	56.303	31.323	9.611	7.723	6	

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SESUAI ASLINYA

a.n. Kepala Dinas

Sekretaris,



Dwi Anggrani, S. STP

NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 7

**JUMLAH KELUARGA YANG TERPAPAR PESAN/INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI PETUGAS
 PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

PERIODE : s.d 2023
 WILAYAH : Kabupaten

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA MENURUT KETERPADAMAN (MEMPEROLEH/MENINGGALKAN MELALUI PESAN/INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI PETUGAS)		PETUGAS										
		YA	TIDAK	PEJABAT PEMERINTAH	PETUGAS KELUARGA BERENCANA (PKU/PLKH/ PETUGAS LAPANGAN KE LAINNYA)	GURU/DOSEN	TOKOH AGAMA	TOKOH MASYARAKAT	DOKTER	BIDAN PERAWAT	PERANCRAT DESA/KELURAHAN	KADER SMP	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	TAKUSUNG	6.483	3.035	74	3.107	27	258	421	377	3.478	1.308	4.160	11	
02	JORONG	5.799	2.868	241	3.509	184	194	408	888	3.819	716	2.000	0	
03	PELAIHARI	16.959	3.749	2.124	10.323	329	893	1.764	1.387	6.345	4.268	8.615	398	
04	KURAU	2.290	1.900	74	1.826	12	64	108	69	915	142	731	0	
05	BATI BATI	9.944	2.884	140	6.870	38	759	811	67	3.926	1.232	6.061	36	
06	PANYIPATAN	5.269	2.148	69	3.202	136	25	296	170	3.513	413	2.368	118	
07	KINTAP	7.806	2.587	756	5.192	83	349	993	261	2.613	1.873	1.878	18	
08	TAMBANG ULANG	3.937	1.668	248	2.315	36	148	472	426	2.100	654	2.323	0	
09	BATU AMPAR	5.441	2.303	136	3.500	20	56	411	146	2.661	489	1.885	8	
10	BAJUN	4.210	994	257	2.809	76	194	941	142	1.635	1.226	2.895	1	
11	BUMI MAKMUR	3.644	557	50	2.971	4	122	261	76	2.363	927	2.000	1	
JUMLAH TOTAL		71.292	28.371	4.176	45.624	896	2.898	9.882	4.029	33.699	13.240	33.099	596	

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
 SESUAI ASLINYA
 a.n. Kepala Dinas
 Sekretaris,



Dwi Anggriani, S. STP
 NIP. 19780313 199612 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1396 -KUM/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45 /869 - KUM/ 2023 TENTANG PENETAPAN DESA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) DAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan wewenang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera namun juga menyangkut masalah Pengendalian Penduduk;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) dimana setiap wilayah diinstruksikan membuat perencanaan dan pembentukan Kampung Berencana (KB);
 - c. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai legalitas pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas (KB), maka kepengurusan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah kepemimpinan dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) melakukan rebinding mulai dari jungle, logo hingga tagline menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang didominasi kaum milenial dan zilenia, adalah mengganti sejumlah nomenklatur dalam program, diantaranya nama Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi "Kampung Keluarga Berkualitas (KB)";

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/869-Kum/2023 tentang Penetapan Desa Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan Struktur Kepengurusan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang 3 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/869-KUM/2023 tentang Penetapan Desa Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan Kepengurusan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.
- KEDUA** : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Tanah Laut nomor 188.45/869-Kum/ 2023 menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menambahkan Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar sebagai Desa Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kabupaten Tanah Laut tahun 2023.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan, Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SAKILAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 1396 -KUM/2023
TANGGAL : 4 Desember 2023

PENETAPAN DESA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

No	Nama Desa	Kecamatan
1.	Desa Atu- Atu	Pelaihari
2.	Desa Bumi Jaya	Pelaihari
3.	Desa Guntung Besar	Pelaihari
4.	Desa Panjaratan	Pelaihari
5.	Desa Tampang	Pelaihari
6.	Desa Kali Besar	Kurau
7.	Desa Kurau	Kurau
8.	Desa Padang Luas	Kurau
9.	Desa Maluka Baulin	Kurau
10.	Desa Sarikandi	Kurau
11.	Desa Tambak Karya	Kurau
12.	Desa Bati-Bati	Bati-Bati
13.	Desa Banyu Irang	Bati-Bati
14.	Desa Bentok Kampung	Bati-Bati
15.	Desa Kait- Kait	Bati-Bati
16.	Desa Kait-Kait Baru	Bati-Bati
17.	Desa Liang Anggang	Bati-Bati
18.	Desa Sambangan	Bati-Bati
19.	Desa Ujung	Bati-Bati
20.	Desa Ujung Baru	Bati-Bati
21.	Desa Bumi Harapan	Bumi Makmur

22.	Desa Handil Babirik	Bumi Makmur
23.	Desa Handil Birayang Atas	Bumi Makmur
24.	Desa Handil Maluka	Bumi Makmur
25.	Desa Pantai Harapan	Bumi Makmur
26.	Desa Martadah	Tambang Ulang
27.	Desa Martadah Baru	Tambang Ulang
28.	Desa Sungai Pinang	Tambang Ulang
29.	Desa Tambang Ulang	Tambang Ulang
30.	Desa Banua Lawas	Takisung
31.	Desa Gunung Makmur	Takisung
32.	Desa Pagatan Besar	Takisung
33.	Desa Ranggung	Takisung
34.	Desa Ranggung Dalam	Takisung
35.	Desa Sumber Makmur	Takisung
36.	Desa Tabanio	Takisung
37.	Desa Bumi Asih	Panyipatan
38.	Desa Kandangan Lama	Panyipatan
39.	Desa Panyipatan	Panyipatan
40.	Desa Suka Ramah	Panyipatan
41.	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan
42.	Desa Asam Asam	Jorong
43.	Desa Asri Mulya	Jorong
44.	Desa Jorong	Jorong
45.	Desa Karang Rejo	Jorong
46.	Desa Sungai Baru	Jorong
47.	Desa Swarangan	Jorong
48.	Desa Batu Ampar	Batu Ampar

49.	Desa Bluru	Batu Ampar
50.	Desa Durian Bungkok	Batu Ampar
51.	Desa Gunung Mas	Batu Ampar
52.	Desa Jilatan	Batu Ampar
53.	Desa Jilatan Alur	Batu Ampar
54.	Desa Tajau Mulya	Batu Ampar
55.	Desa Tajau Pecah	Batu Ampar
56.	Desa Kebun Raya	Kintap
57.	Desa Kintap	Kintap
58.	Desa Kintap Kecil	Kintap
59.	Desa Mekar Sari	Kintap
60.	Desa Riam Adungan	Kintap
61.	Desa Salaman	Kintap
62.	Desa Sebamban Baru	Kintap
63.	Desa Sungai Cuka	Kintap
64.	Desa Sumber Jaya	Kintap
65.	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari
66.	Kelurahan Angsau	Pelaihari
67.	Kelurahan Pabahanan	Pelaihari
68.	Kelurahan Karang Taruna	Pelaihari
69.	Kelurahan Sarang Halang	Pelaihari
70.	Desa Ambawang	Batu Ampar

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL, SH., MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/1396 - KUM/2023
TANGGAL : 4 Desember 2023

STRUKTUR KEPENGURUSAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(KB) SE KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

PELINDUNG : BUPATI TANAH LAUT

PENASEHAT : KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN TANAH LAUT.

PEMBINA : CAMAT SETEMPAT

KETUA : KEPALA DESA/LURAH SETEMPAT

SEKRETARIS : PKB/ PLKB

BENDAHARA : KETUA TP PKK DESA/KELURAHAN
SETEMPAT

PELAKSANA OPERASIONAL : PKB/PLKB, KADER PPKBD, KADER
SUB PPKBD.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,

Dwi Anggriani, S. STP

NIP. 19780313 199612 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinas2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 1
JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB BERDASARKAN JENIS
TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB	JUMLAH FASKES	JENIS TEMPAT PELAYANAN KB										JENIS PEMBERDAYAAN KEJARINGAN					
				JENIS FASKES										PRAKTIK MANDIRI BIDAN (SETANJA PADRESI)	JUMLAH JANGKARAN KEJARINGAN	JENIS PEMBERDAYAAN KEJARINGAN			
				RS UMUM	RS KHUSUS	KLINIK UTAMA	PUSKESMAS	PRAKTIK DOKTER	KLINIK PRATAMA	RS TIPE 0 PRATAMA	PRK	POSTY	BUSUNG			POKESDES POLINDUK	SIKAPK MANDIRI BIDAN KEJARINGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
01	TAKISUNG	14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	0	0	12	1		
02	JORONG	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
03	PELAHARI	7	5	1	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
04	KURAU	10	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0		
05	BATI BATI	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06	PANYIPATAN	6	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0		
07	KINTAP	5	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2		
08	TAMBANG ULANG	10	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0		
09	BATU AMPAR	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	BAJUIN	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	BUMI MAKMUR	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Total		63	24	2	0	0	22	0	0	0	0	0	39	0	0	33	6		

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
 SESUAI ASLINYA
 a.n. Kepala Dinas
 Sekretaris.



Dwi Anggrani, S.STP
 NIP.197803131996122001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 5A
JUMLAH PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH DESA KELURAHAN	JUMLAH PPKBD	KLASIFIKASI			KEPEMBERKASAN SR PENYURUNAN		SUMBER DANA KEBIDATAN OPERASIONAL				
				DASAR	BERKEMBIANG	MANDIRI	ADA	TIDAK	APEH	APEB	ADD	SWALAYA	MITRA
01	TAKISUNG	12	12	12	0	0	12	0	11	1	0	0	0
02	JORONG	11	11	11	0	0	11	0	11	0	0	0	0
03	PELAIHARI	20	18	18	0	0	18	0	18	15	0	0	0
04	KURAU	11	11	11	0	0	11	0	11	1	0	0	0
05	BATI BATI	14	14	14	0	0	14	0	14	14	0	0	0
06	PANYIPATAN	10	10	10	0	0	10	0	10	4	0	0	0
07	KINTAP	14	14	14	0	0	13	1	14	14	0	0	0
08	TAMBANG ULANG	9	9	9	0	0	9	0	9	8	0	0	0
09	BATU AMPAR	14	14	14	0	0	14	0	12	6	0	0	0
10	BAJUIN	9	9	9	0	0	9	0	9	8	0	0	0
11	BUMI MAKMUR	11	11	11	0	0	9	2	11	3	0	0	0
Jumlah Total		135	133	133	0	0	130	3	130	74	0	0	0

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
 SESUAI ASLINYA
 a.n. Kepala Dinas



Dwi Anggrani, S.STP
 NIP.19780313.199612.2.001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 6A
JUMLAH SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ RW	JUMLAH SUB PPKBD	KEPEMILIKAN SK PENGUKURAN		SUMBER DANA KEGIATAN OPERASIONAL					KEPEMILIKAN MEDIA PENDUKUNG					KEPEMILIKAN SALURAN KOMUNIKASI			
				ADA	TIDAK	APBN	APBD	KDD	SWADAYA	MITRA	MATERI KIR	BUKU BAKU	RELAT PERACA	LAINNYA	TIDAK MEMILIKI	APLIKASI BILIK	MEGASIS	RADIO KOMUNITAS	TAYAR MUKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	TAKISUNG	52	51	51	0	51	47	0	0	0	51	1	1	0	0	0	51	0	0
02	JORONG	42	43	43	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0	0	1	41	0	36
03	PELAIHARI	77	56	55	1	52	52	0	0	0	52	1	0	0	4	36	18	0	28
04	KURAU	29	15	15	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
05	BATI BATI	47	36	25	11	36	34	0	0	0	36	0	0	0	0	0	36	0	36
06	PANYIPATAN	39	41	39	2	41	7	0	0	0	41	0	0	0	0	0	22	0	40
07	KINTAP	50	45	37	8	45	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	0	44
08	TAMBANG ULANG	24	22	15	7	22	3	0	0	0	22	5	0	0	0	0	19	0	6
09	BATU AMPAR	50	45	45	0	40	15	0	0	0	44	39	38	0	1	0	1	0	45
10	BAJUIN	28	28	28	0	28	18	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
11	BUMI MAKMUR	32	33	25	8	33	6	0	0	0	30	0	0	0	3	6	11	0	31
Jumlah Total		478	415	374	37	406	227	0	0	0	402	46	39	0	8	43	244	0	309

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
 SESUAI ASLINYA
 a.n. Kepala Dinas
 Sekretaris,



Dwi Angeriani, S.STP
 NIP.197803131996122001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 8A

JUMLAH BINA KELUARGA BALITA (BKB) BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI KELOMPOK KEGIATAN
TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH DESA KELURAHAN	JUMLAH BKB	KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN		STATUS HOLISTIK INTEGRATIF (HI)		KETERPADUAN KELOMPOK			JUMLAH BKB PADA KAMPUNG KB
				ADA	TIDAK ADA	BKB HI	NON BKB HI	POSYANDU	PAUD	LAINNYA	
01	TAKISUNG	12	3	3	0	2	1	3	2	0	3
02	JORONG	11	12	11	1	3	9	11	4	1	4
03	PELAIHARI	20	16	15	1	5	11	15	5	1	6
04	KURAU	11	7	7	0	3	4	6	4	0	3
05	BATI BATI	14	5	5	0	0	5	3	0	1	2
06	PANYIPATAN	10	7	6	1	2	5	6	2	2	7
07	KINTAP	14	4	4	0	3	1	4	3	2	4
08	TAMBANG ULANG	9	5	5	0	0	5	5	0	0	2
09	BATU AMPAR	14	5	5	0	0	5	5	0	0	1
10	BAJUIN	9	13	13	0	1	12	13	1	0	13
11	BUMI MAKMUR	11	8	8	0	1	7	8	1	0	4
JUMLAH TOTAL		145	85	82	3	20	65	79	22	7	49

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SESUAI ASLINYA

a.n. Kepala Dinas

Sekretaris,



Dwi Anggrani, S.STP

NIP.197803131996122001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinas2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 9A

JUMLAH BINA KELUARGA REMAJA (BKR) BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI KELOMPOK KEGIATAN
TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH BKR	KEPEMILIKAN SK PENGURUHAN		KETERPADUAN KELOMPOK		JUMLAH BKR PTD/PN	JUMLAH BKR PADA KAMPUNG KEL.
				ADA	TIDAK ADA	EKONOMI PRODUKTIF	LAINNYA		
01	TAKISUNG	12	1	1	0	0	1	1	1
02	JORONG	11	1	0	1	0	1	0	0
03	PELAIHARI	20	5	5	0	2	2	2	4
04	KURAU	11	1	1	0	0	1	0	1
05	BATI BATI	14	3	2	1	0	1	0	2
06	PANYIPATAN	10	3	3	0	0	3	1	3
07	KINTAP	14	3	2	1	0	1	0	3
08	TAMBANG ULANG	9	3	3	0	0	0	0	2
09	BATU AMPAR	14	1	1	0	0	0	0	1
10	BAJUIN	9	13	11	2	0	12	1	13
11	BUMI MAKMUR	11	6	6	0	0	4	4	4
JUMLAH TOTAL		135	40	35	5	2	20	9	34

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SESUAI ASLINYA

dan Kepala Dinas

Sekretaris,



Dwi Anggriani, S.STP

NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 10A
JUMLAH BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI KELOMPOK KEGIATAN
TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODOR	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEI	JUMLAH BKL	KEPEMILIKAN SK PENGUKUTAN		KETERFAKSIAN KELOMPOK				JUMLAH BKL PRO/PN	JUMLAH BKL PADA KAMPUNG KB	JUMLAH C&E BKL
				AGA	TIDAK	PROHOM PRODUKTIF	POSYANDU LANSIA	PUSAKA	LAINNYA			
01	TAKISUNG	12	2	1	1	0	2	0	0	0	2	0
02	JORONG	11	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
03	PELAIHARI	20	5	5	0	0	6	0	0	3	3	0
04	KURAU	11	2	2	0	0	2	0	0	1	2	0
05	BATI BATI	14	4	3	1	0	1	0	1	2	2	0
06	PANYIPATAN	10	3	3	0	0	3	0	0	2	3	1
07	KINTAP	14	2	2	0	0	2	0	0	1	2	0
08	TAMBANG ULANG	9	2	2	0	0	2	0	0	2	2	2
09	BATU AMPAR	14	2	1	1	0	2	0	0	2	2	0
10	BAJUIN	9	6	6	0	0	6	0	0	2	6	2
11	BUMI MAKMUR	11	8	5	3	3	5	0	0	6	4	0
Jumlah Total		135	36	31	7	3	32	0	2	21	28	5

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SESUAI ASLINYA

aa Kepala Dinas

Sekretaris,



Dwi Angerian, S.STP
NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 11A

JUMLAH USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)
BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI KELOMPOK KEGIATAN

TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEK	JUMLAH UPPKA	JENIS KELOMPOK USAHA						KEBUTUHAN SAH		JUMLAH UPPKA PADA KAMPUNG
				PEREKONOMIAN	PERIKANAN	PELAYANAN LAINYA	RUCINER	KEBUDUKH	LAINNYA	ADA	TIDAK	
01	TAKISUNG	12	2	0	0	1	1	1	2	2	0	1
02	JORONG	11	2	0	0	1	0	1	1	0	2	0
03	PELAIHARI	20	4	2	1	1	3	2	4	3	1	3
04	KURAU	11	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
05	BATI BATI	14	3	1	1	1	1	0	2	1	2	1
06	PANYIPATAN	10	4	1	0	1	1	1	3	4	0	2
07	KINTAP	14	2	0	1	0	2	1	2	2	0	0
08	TAMBANG ULANG	9	3	1	0	2	0	0	0	2	1	2
09	BATU AMPAR	14	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
10	BAJUIN	9	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
11	BUMI MAKMUR	11	2	1	0	0	1	0	2	2	0	2
Jumlah Total		135	25	7	3	7	10	6	19	19	7	12

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SESUAI ASLINYA

a.n. Kepala Dinas

Sekretaris,



Dwi Anggrini, S.STP

NIP.197803131996122001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 12A

JUMLAH PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA/MAHASISWA (PIK REMAJA)
BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI KELOMPOK KEGIATAN
TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PIK REMAJA	ID PEMILIKAN SK PENGURUSAN		MAGIS					NITELERADUAN KELOMPOK		JUMLAH PIK REMAJA PTDG PN	JUMLAH PIK REMAJA PADA KAMPUNG/DES	
			ADA	TIDAK	JALUR PENDIDIKAN		JALUR MASYARAKAT			YA	TIDAK			
					SMK/SETARA	SMK/SETARA	PERUBAHAN TINGGI	ORGANISASI PESAWAHAN	LSM/ORGANISASI KEPEREMPUAN/ORGANISASI KEWAWASAN KEMASYARAKATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	TAKISUNG	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
02	JORONG	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
03	PELAIHARI	6	6	0	1	2	0	0	0	3	0	0	5	2
04	KURAU	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
05	BATI BATI	3	3	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2
06	PANYIPATAN	3	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	3
07	KINTAP	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
08	TAMBANG ULANG	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
09	BATU AMPAR	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1
10	BAJUIN	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	1	3
11	BUMI MAKMUR	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah Total		27	21	6	3	8	0	1	1	14	0	0	13	16

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SESUAI ASLINYA

an. Kepala Dinas

Sekretaris,



Dwi Angriani, S.STP

NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 13A

**JUMLAH RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA (RUMAH DATAKU)
BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI YANG DIMILIKI**

TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH DATAKU	KEPERMILIKAN DK PENGUMAHAN		SUMBER DANA KEGIATAN						JUMLAH RUMAH DATAKU PARIPURNA		KEBERADAAN PADA KAMPUNG KB	
			ADA	TIDAK	APBN	APBD	ADD	SWADAYA	SWASTA/ CSR	LAINNYA	13	14	13	14
01	TAKISUNG	3	3	0	1	2	1	1	0	3	1	2	1	
02	JORONG	2	2	0	0	2	0	0	0	2	1	2	1	
03	PELAHARI	3	3	0	2	2	2	2	0	3	1	3	1	
04	KURAU	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
05	BATI BATI	2	1	1	2	0	0	0	0	2	0	2	0	
06	PANYIPATAN	2	2	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	
07	KINTAP	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	
08	TAMBANG ULANG	2	2	0	2	0	0	0	0	2	2	2	2	
09	BATU AMPAR	2	0	2	0	0	1	1	0	2	0	2	0	
10	BAJUIN	6	2	4	3	1	3	2	0	6	2	6	2	
11	BUMI MAKMUR	3	3	0	1	2	1	1	0	3	1	3	1	
Jumlah Total		27	19	8	13	9	9	8	0	27	8	28	9	

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SESUAI ASLINYA

a.n. Kepala Dinas

Sekretaris,



Dwi Anggrani, S.STP

NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari 70814

Email : dinas2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 14A
JUMLAH PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)
TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PPKS	TINGKATAN PPKS			KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	
			PROVINSI	KAB/KOTA	KEC	ADA	TIDAK
01	TAKISUNG	1	0	0	1	0	1
02	JORONG	1	0	0	1	0	1
03	PELAHARI	1	0	0	1	1	0
04	KURAU	1	0	0	1	1	0
05	BATI BATI	1	0	0	1	0	1
06	FANYIPATAN	1	0	0	1	1	0
07	KINTAP	1	0	0	1	0	1
08	TAMBANG ULANG	1	0	0	1	1	0
09	BATU AMPAR	1	0	0	1	1	0
10	BAJUIN	1	0	0	1	1	0
11	BUMI MAKMUR	1	0	0	1	1	0
JUMLAH TOTAL		11	0	0	11	7	4

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA
a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,

Dwi Anggrani, S.STP
NIP.197803131996122001





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

TABEL 15A
JUMLAH KAMPUNG KB BERDASARKAN IDENTITAS DAN INFORMASI YANG DIMILIKI
TAHUN: 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEK	JUMLAH KAMPUNG KB	TAHUN PEMBENTUKAN					JUMLAH KAMPUNG KB MANDIRI	JUMLAH KAMPUNG KB PERCONTONGAN
				2016	2017	2018	2019	2019		
01	TAKISUNG	12	5	1	0	1	0	3	0	0
02	JORONG	11	3	1	0	1	0	1	0	0
03	PELAIHARI	20	5	0	1	1	0	3	0	2
04	KURAU	11	3	0	2	0	1	0	0	0
05	BATI BATI	14	3	0	0	2	0	1	0	0
06	PANYIPATAN	10	3	1	0	1	0	1	0	0
07	KINTAP	14	2	0	1	0	1	0	0	0
08	TAMBANG ULANG	9	2	0	1	1	0	0	0	0
09	BATU AMPAR	14	2	0	1	1	0	0	0	0
10	BAJUIN	9	9	0	1	1	0	7	0	1
11	BUMI MAKMUR	11	4	0	1	1	0	2	0	0
Jumlah Total		135	41	3	8	10	2	18	0	3

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

SESUAI ASLINYA

a.n. Kepala Dinas

Sekretaris

Dwi Anggrani, S.STP

NIP.197803131996122001



DAFTAR NAMA FASKES YANG MELAYANI MKJP

NO	KODE	KELOMPOK A / GANJIL	KODE	KELOMPOK B / GENAP
1	6301052	Bentok Kampung(Kecamatan Bati-Bati)	6301051	Pelaihari (Kecamatan Pelaihari)
2	6301014	Kait-Kait(Kecamatan Bati-Bati)	6301022	Angsau (Kecamatan Pelaihari)
3	6301002	Bati-Bati (Kecamatan Bati-Bati)	6301017	Tirta Jaya (Kecamatan Bajuin)
4	6301033	Bumi Makmur (Kecamatan Bumi Makmur)	6301012	Tanjung Habulu (Kecamatan Bajuin)
5	6301023	Kurau (Kecamatan Kurau)	6301006	Tajau Pecah (Kecamatan Batu ampar)
6	6301011	Padang Luas (Kecamatan Kurau)	6301055	Durian Bungkok (Kecamatan Batu ampar)
7	6301013	Tambang Ulang (Kecamatan Tambang Ulang)	6301003	Jorong (Kecamatan Jorong)
8	6301071	Panggung (Kecamatan Pelaihari)	6301016	Asam-Asam (Kecamatan Jorong)
9	6301015	Sungai Riam (Kecamatan Pelaihari)	6301008	Kintap (Kecamatan Kintap)
10	6301005	Takisung (Kecamatan Takisung)	6301010	Sungai Cuka (Kecamatan Kintap)
11	630100503	PMB St.Ngatminah (Kecamatan Takisung)	6301024	PMB NoorKamilah (Jorong)
12	6301007	Panyipatan (Kecamatan Panyipatan)	6301050	RSUD H.Boejasin (Kecamatan Pelaihari)
13	6301018	Batakan (Kecamatan Panyipatan)	6301069	RSUD KH.Masnyur
14	630105105	PMB Assyifa (Kecamatan Pelaihari)		
15				
16				

KETERANGAN :

Kelompok A dikirim setiap bulan Ganjil dan Kelompok B dikirim setiap bulan Genap.
Pengiriman Alokon diatas tanggal 15 Pada setiap bulan.

Jumlah faskes yang melayani KB MKJP = 27

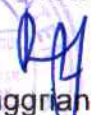
----- x 100%

Jumlah faskes = 27

= 100%

**MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA**

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,


Dwi Anggrani, S. STP
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780313 199612 2 001



Mengetahui Kabid KB/KS



Hj.Siti Zuraida, SKM, M.AP
NIP. 19671020 19912 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

JUMLAH PESERTA KB AKTIF
BULAN : DES - 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN
Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOM	TUBEKTOM	MAL	TOTAL	
01	TAKISUNG	5097	2411	2215	44	247	40	4	125	0	5086	11
02	JORONG	5211	3403	1241	51	314	63	0	122	7	5201	10
03	PELAHARI	8964	5341	2421	118	549	251	12	230	2	8924	40
04	KURAU	2201	1258	729	22	156	10	6	18	0	2199	2
05	BATI BATI	8805	3577	2598	50	381	68	1	121	0	8796	9
06	PANYIPATAN	4070	2719	750	64	413	46	2	65	0	4059	11
07	KINTAP	5702	3539	1624	10	306	54	12	131	6	5682	20
08	TANBANG ULANG	2865	1316	1234	41	212	15	2	40	1	2861	4
09	BATU AMPAR	3963	2179	1075	57	301	123	6	177	0	3948	15
10	BAJUN	2960	1332	1042	47	310	124	2	99	0	2956	4
11	BUMI MAHUR	2160	1039	983	20	91	8	1	10	0	2152	8
JUMLAH TOTAL		49998	28114	15912	554	3280	802	48	1138	16	49864	134

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

$$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif (MKJP)}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\% = \frac{5268}{49997} \times 100\% = 10,53\%$$

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA
a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,
Dwi Anggrani, S.STP
NIP.197803131996122001



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 828 -KUM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KELOMPOK KERJA ADVOKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) dimana di setiap wilayah diinstruksikan membuat perencanaan dan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB);
 - b. bahwa Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu bentuk atau miniature model pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan bersinergi dengan Kementrian/ Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat pemerintah terendah;
 - c. bahwa untuk lebih meoptimalkan pelaksanaannya dilapangan perlu melakukan program dan kegiatan yang terintegrasi melalui Kampung Keluarga Berencana (KB) dan pengintegrasian pembangunan lintas sektor terkait;
 - d. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bawah kepemimpinan dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) melakukan rebanding mulai dari jungle, logo hingga tagline menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang didominasi kaum milenial dan zilenia, *adalah mengganti sejumlah nomenklatur dalam program, diantaranya nama Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi "Kampung Keluarga Berkualitas (KB)";*
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja Advokasi

Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
 8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja Advokasi Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan daftar susunan dan keanggotaan Tim Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. *memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap tim pengarah dan tim teknis dalam upaya mewujudkan kondisi agar rencan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh Kabupaten/ Kota yang telah dibentuk dan dicanangkan dapat terelakan dan terwujud dengan baik;*
- b. *memberikan arahan kepada tim teknis dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam upaya mewujudkan kondisi agar rencana penyelenggaraan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dapat terelakan dan terwujud dengan baik;*
- c. *memberikan pemahaman tentang konsep Kampung Keluarga Berkualitas termasuk indikator-indikator keberhasilan yang harus dicapai :*
 1. Menyiapkan Data dan Informasi
 2. Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

3. Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga;
 4. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Program Kesehatan;
 6. Program Sosial Ekonomi;
 7. pendidikan;
 8. Program Pemukiman dan Lingkungan;
 9. Program lainnya sesuai perkembangan; dan bentuk pelayanan program dimaksud poin a s.d poin h sesuai dengan tugas dan fungsi ditentukan oleh Lembaga, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- d. mensosialisasikan rencana program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas yang telah disusun;
- e. pemaparan informasi tentang alur penganggaran kegiatan (APBN/APBD/Dana Desa/ dukungan anggaran lintas sektor);
- f. mensosialisasikan format-format evaluasi dan pelaporan;
- g. koordinasi lintas sektor dan kemitraan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tanah Laut.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Juni 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ 828 -KUM/2023
 TANGGAL : 13 Juni 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KELOMPOK KERJA ADVOKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
 TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

- Pelindungan/ Pembina : Bupati Tanah Laut.
 Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 Pembina : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut.
 Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
 Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
 Sekretaris I : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
 Sekretaris II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
 a. Sub Tim Kependudukan
 Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
 Anggota : 1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
 2. Koalisi Kependudukan Kabupaten Tanah Laut.
 3. Kodim 1009/ Pelaihari
 4. DPRD Kabupaten Tanah Laut
 5. Badan Pusat Statistik.
 b. Sub Tim Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi.
 Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Tanah Laut
 Anggota : 1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
 2. Dinas Kesehatan Tanah Laut.
 3. PD IBI Kabupaten Tanah Laut.
 c. Sub Tim Pemberdayaan Keluarga, Sosial, Ekonomi, dan Perlindungan Anak.
 Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
 Anggota : 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Tanah Laut.
 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Laut.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
5. TP PKK Kabupaten Tanah Laut
6. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
- d. Sub Tim Pendidikan
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
- Anggota :
1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
 3. Asosiasi Kelompok UPPKS Kabupaten Tanah Laut.
 4. Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut.
 5. Politeknik Negeri Tanah Laut.
- e. Sub Tim Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- Koordinator : Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Tanah Laut.
- Anggota :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Tanah Laut.
 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut
 6. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

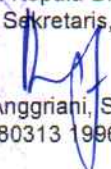
BUPATI TANAH LAUT

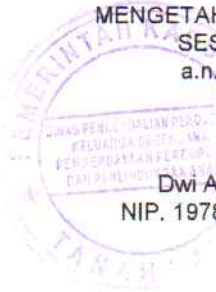
Ttd

H. SUKAMTA



MENGETAHUI / MENGESAHKAN
 SESUAI ASLINYA
 a.n. Kepala Dinas
 Sekretaris,


 Dwi Anggriani, S. STP
 NIP. 19780313 199612 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JUMLAH PESERTA KB PASCA SALIN
 BULAN : DES - 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN

Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	METODE KONTRASEPSI											
			SUNTIKAN			PIL		KONDOM	IMPLAN		IUD	VASEKTOMI	TUBEK TOMI	
			1 BULANAN	3 BULANAN KOMBINASI	3 BULANAN PROGESTIN	KOMBINASI	PROGESTIN		1 BATANG	2 BATANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	TAKISUNG	5971	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	JORONG	6514	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	
03	PELAIHARI	11659	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	KURAU	2767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	BATI BATI	8006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	PANYIPATAN	4724	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0	1	
07	KINTAP	7232	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
08	TAMBANG ULANG	3568	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
09	BATU AMPAR	4747	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
10	BAJUIN	3547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	BUMI MAKMUR	2431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Total		61166	10	13	6	7	0	0	0	3	0	0	4	

Rumus $\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah Persalinan}} \times 100$

$\frac{2378}{5733} \times 100 \% = 41,48 \%$

Pelaihari, 19 Januari 2024
 A.n Plt Kepala Dinas
 Sekretaris


 DWIANGGRIANI, S.STP
 Pembina Tk. (IV/b)
 NIP. 19780313 199612 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JUMLAH PESERTA KB AKTIF TERENDAH
BULAN : DES - 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN
Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOM	TUBEKTOM	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
01	TAKISUNG	5097	2411	2215	44	247	40	4	125	0	5086	11
02	JORONG	5211	3403	1241	51	314	63	0	122	7	5201	10
03	PELAIHARI	8964	5341	2421	118	549	251	12	230	2	8924	40
04	KURAU	2201	1258	729	22	156	10	6	18	0	2199	2
05	BATI BATI	6805	3577	2598	50	381	68	1	121	0	6796	9
06	PANYIPATAN	4070	2719	750	64	413	46	2	65	0	4059	11
07	KINTAP	5702	3539	1624	10	306	54	12	131	6	5682	20
08	TAMBANG ULANG	2865	1316	1234	41	212	15	2	40	1	2861	4
09	BATU AMPAR	3963	2179	1075	87	301	123	6	177	0	3948	15
10	BAJUIN	2960	1332	1042	47	310	124	2	99	0	2956	4
11	BUMI MAKMUR	2160	1039	983	20	91	8	1	10	0	2152	8
JUMLAH TOTAL		49998	28114	15912	554	3260	802	48	1138	16	48864	134

Rumus $\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Terendah}}{\text{Jumlah Pasangan KB Aktif}} \times 100 \%$

$$\frac{48}{49998} \times 100 \% = 0,09 \%$$



Pelatihari, 19 Januari 2024
A.n Plt Kepala Dinas
Sekretaris

DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I(IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JUMLAH PESERTA KB / PASANGAN PENERIMA PBI
BULAN : DES - 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN
Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	KESERTAAN JAMINAN KESEHATAN				TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
			JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)			NON JKN	
			JKN-PBI	JKN-NON PBI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
01	TAKISUNG	5971	3428	907	4335	70	1566
02	JORONG	6514	2113	1815	3928	447	2139
03	PELAIHARI	11659	4554	3887	8441	396	2822
04	KURAU	2787	1500	381	1881	79	807
05	BATI BATI	8006	3815	2036	5851	317	1838
06	PANYIPATAN	4724	3384	457	3841	49	834
07	KINTAP	7232	3072	2003	5075	451	1706
08	TAMBANG ULANG	3568	1595	790	2385	56	1127
09	BATU AMPAR	4747	2181	1474	3655	194	898
10	BAJUIN	3547	2129	743	2872	31	644
11	BUMI MAKMUR	2431	1573	250	1823	13	595
JUMLAH TOTAL		61166	29344	14743	44087	2103	14976

Rumus $\frac{\text{Jumlah Peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100 \%$

$\frac{29353}{44101} \times 100 \% = 66,55 \%$



Pelaihari, 19 Januari 2024
A n Plt Kepala Dinas
Sekretaris

DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinas2kbp3atanahlaut@gmail.com

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1) IKK Outcome : Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal APBD}}{\text{Jumlah Seluruh Anggaran Belanja Operasi dan Modal di APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp. 294.968.413.698}}{\text{Rp. 2.233.750.361.037}} \times 100\%$ $13,21\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD adalah jumlah keseluruhan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD di seluruh perangkat daerah provinsi. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah).Jumlah Seluruh Anggaran Belanja Operasi dan Modal di APBD adalah jumlah keseluruhan belanja operasi dan belanja modal APBD. (PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Pelaihari, 23 Januari 2024

Pt. Kepala Dinas,



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN PUG PADA PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH DIEVALUASI MELALUI
ANALISIS GENDER DI KABUPATEN TANAH LAUT

N O	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)/ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	91,398,340
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK/ Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82,732,958
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	38,825,040
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27,946,140
		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN / Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	54,799,790
		PROGRAM PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN / Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	467,675,545
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM/ Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/ Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	28,617,276,000
3	DINAS PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar/ Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar	55,510,090

4	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN/Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1,341,653,650
5	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22,418,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129,115,000
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	75,000,000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	44,917,912
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	28,401,091
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/ Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	300,000,000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	70,286,672
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA/ Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	349,999,660
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA/ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	245,456,776
9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN/ Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	672,479,119
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN/ Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/ Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	468,740,000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN/ Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,307,443,781

		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI/ Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi/ Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi	63,299,694
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN/ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah/ Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	203,401,730
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING/ Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota	264,139,543
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN/ Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan/ Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	18,462,740
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN/ Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan/ Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	59,789,146
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN/ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah/ Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	203,126,039
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)/ Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Kelembagaan Potensi Pengembangan Usaha Mikro	2,183,017,085
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah/ Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	193,495,282
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Kegiatan Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah/ Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	241,064,872,346
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	18,309,245
11	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL/ Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial/ Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	4,436,860,000
12	DINAS PETERNAKAN DAN HEWAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,997,605
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/ Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	134,929,754

		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tanaman dan Mikroorganisme Kewenangan/ Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan dan Tanaman	69,972,856
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PRMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILISASI UMUM (PSU)/ Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan/ Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilisasi Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	118,640,000
14	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	PROGRAM Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8,998,138,368
		PROGRAM Perizinan Usaha Pertanian/ Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Izin Kegiatan Uahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	22,082,200
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	60,000,000
		PROGRAM Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	344,845,087
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN/ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dg komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	135,322,746
		PROGRAM Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian/ Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota/ Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	276,159,903
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN/ Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa	200,000,000
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK/ Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk/ Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	212,409,510
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH/ Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN/ Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	100,000,000
17	KELURAHAN PELAIHARI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	314,893,935
18	KELURAHAN ANGSAU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	339,693,640
19	KELURAHAN SARANG HALANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	163,145,520

20	KELURAHAN PABAHANAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN/ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan/ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	257,334,160
TOTAL			294,968,413,698

Pelaihari, 23 Januari 2024

Pt. Kepala Dinas,



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.739.292.358.915	2.205.493.594.173,45	126,80	2.159.239.661.100,08
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	215.796.462.766	201.345.307.158,18	93,30	193.890.015.754,08
4.1.01	Pajak Daerah	49.200.000.000	52.648.545.663,68	106,79	45.363.440.225,80
4.1.02	Retribusi Daerah	8.506.734.000	7.676.400.350,00	90,24	6.971.598.007,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.005.308.674	12.005.672.488,00	100,00	11.010.810.384,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	145.984.420.092	129.014.688.656,50	88,38	130.544.167.137,28
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	215.796.462.766	201.345.307.158,18	93,30	193.890.015.754,08
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.522.295.931.980	2.003.859.813.167,27	131,63	1.963.205.983.275,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.400.436.231.980	1.803.144.970.475,00	128,76	1.781.587.762.522,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.859.700.000	200.714.842.692,27	164,71	181.618.220.753,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.199.964.169	288.473.848,00	24,04	2.143.662.071,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.199.964.169	225.955.623,00	18,83	2.143.662.071,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kerentanan Peristiran Perundang-Undangan	0	62.518.225,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.199.964.169	288.473.848,00	24,04	2.143.662.071,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.739.292.358.915	2.205.493.594.173,45	126,80	2.159.239.661.100,08
5	BELANJA DAERAH	2.502.266.740.528	2.199.057.665.430,00	87,88	1.863.861.922.192,18
5.1	BELANJA OPERASI	1.574.603.639.931	1.367.740.197.750,00	86,86	1.241.627.856.198,18
5.1.01	Belanja Pegawai	775.304.987.027	680.411.633.066,00	87,76	653.956.945.688,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.220.290.124	577.351.021.869,00	84,63	520.933.208.907,18
5.1.05	Belanja Hibah	106.017.572.780	99.945.722.815,00	94,27	44.321.201.603,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.060.790.000	10.031.820.000,00	90,70	22.416.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.574.603.639.931	1.367.740.197.750,00	86,86	1.241.627.856.198,18
5.2	BELANJA MODAL	659.146.721.106	586.123.814.015,00	88,92	397.257.596.454,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.312.057.067	1.792.454.291,00	6,81	240.492.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.751.870.998	110.962.442.883,00	84,86	91.151.091.039,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.456.505.513	182.294.117.083,00	94,23	104.788.622.560,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	301.479.559.023	284.872.511.071,00	94,49	200.681.712.555,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	839.257.500	732.986.495,00	87,34	16.548.300,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.307.471.005	5.469.302.192,00	86,71	379.130.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	659.146.721.106	586.123.814.015,00	88,92	397.257.596.454,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.172.915.145	540.899.999,00	2,44	746.426.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.172.915.145	540.899.999,00	2,44	746.426.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	22.172.915.145	540.899.999,00	2,44	746.426.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	246.343.464.346	244.652.753.666,00	99,31	224.230.043.540,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.124.680.450	6.111.780.450,00	99,79	4.895.286.950,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	240.218.783.896	238.540.973.216,00	99,30	219.334.756.590,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	246.343.464.346	244.652.753.666,00	99,31	224.230.043.540,00
	JUMLAH BELANJA	2.502.266.740.528	2.199.057.665.430,00	87,88	1.863.861.922.192,18
	SURPLUS/DEFISIT	(762.974.381.613)	6.435.928.743,45	(0,84)	295.377.738.907,90
6	PEMBIAYAAN DAERAH	848.384.654.012	849.169.732.012,00	100,09	536.325.812.032,83
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	906.703.550.940	907.488.628.940,00	100,09	611.325.812.032,83
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	831.703.550.940	831.703.550.940,00	100,00	604.990.188.933,83
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	75.000.000.000	75.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	785.078.000,00	0,00	6.335.623.099,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	906.703.550.940	907.488.628.940,00	100,09	611.325.812.032,83
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58.318.896.928	58.318.896.928,00	100,00	75.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000,00	100,00	40.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28.318.896.928	28.318.896.928,00	100,00	25.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58.318.896.928	58.318.896.928,00	100,00	75.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	848.384.654.012	849.169.732.012,00	100,09	536.325.812.032,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	85.410.272.399	855.605.660.755,45	1.001,76	831.703.550.940,73

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Belanja Operasi + Belanja Modal = Rp. 2.233.750.361.037,-

Kab. Tanah Laut, 08 Januari 2024
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

MUHAMMAD DARMIN, S.JP,
M.Si
NIP. 196612271987031002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SESUAI ASLINYA
Plt. Kepala Dinas,



Dwi Anggriani, S. STP

NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
 Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

2) IKK Outcome : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
Rumus	<p style="text-align: right;"><i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</i> X 100%</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><i>Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)</i></p> $= \frac{41}{41} \times 100\%$ $= 100\%$
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi adalah jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan; ▪ Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) adalah jumlah penduduk usia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan.

Pelaihari, 23 Januari 2024
 Plt. Kepala Dinas,

DWI ANGGRIANI, S.STP
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

DAFTAR KASUS ANAK DI UPTD PPA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023
PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2023

NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAPORAN	JENIS KASUS	ALAMAT	RUJUKAN DARI	TINDAK LANJUT
1	Kec. Kintap	02 Januari 2023	Eksplotasi / pekerja anak	Ds. Salaman Kec. Kintap	Laporan masyarakat	Koordinasi
2	Kec. Jorong	02 Januari 2023	Pengancaman via online / lainnya	Ds. Asam Jaya Kec. Jorong	Sendiri	Terima pengaduan/arahan
3	Kec. Jorong	04 Januari 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Muara Asam-Asam Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
4	Kec. Pelaihari	04 Januari 2023	Pelecehan Seksual / Sodomi, Psikis	Jalan Sawahan Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
5	Kec. Pelaihari	09 Januari 2023	Psikologis / Lari dari rumah	Ds. Sungai Riam Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
6	Kec. Batu Ampar	25 Januari 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Gunung Melati Kec. Batu Ampar	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
7	Kec. Takisung	08 Februari 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Benua Lawas Kec. Takisung	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
8	Kec. Takisung	08 Februari 2023	Pelaku Pelecehan Seksual / ABH	Ds. Telaga Langsung Kec. Takisung	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
9	Kec. Pelaihari	02 Maret 2023	Kekerasan Psikis	Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	Orang tua	Pemeriksaan Psikologis
10	Kec. Pelaihari	02 Maret 2023	Kekerasan Psikis	Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	Orang tua	Pemeriksaan Psikologis
11	Kec. Bajuin	14 Maret 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Sungai Bakar Kec. Bajuin	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
12	Kec. Kintap	24 Maret 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Kebun Raya Kec. Kintap	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
13	Kec. Jorong	27 Maret 2023	Kekerasan fisik / Pengeroyokan, Psikis	Ds. Asam-Asam Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
14	Kec. Panyipatan	06 April 2023	Eksplotasi / pekerja anak di warung malam	Ds. Kuringkit Kec. Panyipatan	Satpol PP dan Damkar	Pengarahan dan Pemulangan
15	Kec. Kurau	10 April 2023	Pelecehan Seksual, Psikis	Ds. Maluka Baulin Kec. Kurau	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
16	Kec. Batu Ampar	02 Mei 2023	Pelecehan Seksual, Psikis	Ds. Satui Sungai Danau Kab. Tanbu	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
17	Kec. Jorong	23 Mei 2023	Anak Berhadapan Hukum	Ds. Asam-Asam Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis

18	Kec. Jorong	23 Mei 2023	Anak Berhadapan Hukum	Ds. Sungai Baru Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
19	Kec. Kurau	13 Juni 2023	Diduga eksplotasi, Psikis	Ds. Padang Luas Kec. Kurau	Orang tua	Pemeriksaan Psikologis
20	Kec. Pelaihari	23 Juni 2023	Psikologis	Ds. Panggung Kec. Pelaihari	Sekolah	Pemeriksaan Psikologis
21	Kec. Takisung	03 Juli 2023	Diduga tidak terurus, Psikis	Ds. Ranggung Dalam Kec. Takisung	Orang tua	Pemeriksaan Psikologis
22	Kec. Jorong	05 Juli 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Batalang Kec. Jorong	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
23	Kec. Pelaihari	24 Juli 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Polsek Pelaihari	Pemeriksaan Psikologis
24	Kec. Bati-Bati	28 Juli 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Pandahan Kec. Bati-Bati	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
25	Kec. Batu Ampar	01 Agustus 2023	Pelecehan Seksual / Persetubuhan, Psikis	Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
26	Kec. Pelaihari	07 Agustus 2023	Pelecehan Seksual	Ds. Panggung Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
27	Kec. Pelaihari	07 Agustus 2023	Dugaan Pelaku Pencabulan	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
28	Kec. Pelaihari	21 Agustus 2023	Pesta minuman keras dan suka sesama jenis	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis dan Pemulangan
29	Kec. Pelaihari	21 Agustus 2023	Pesta minuman keras dan suka sesama jenis	Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis dan Pemulangan
30	Kec. Pelaihari	21 Agustus 2023	Pesta minuman keras dan suka sesama jenis	Jalan Kamboja Banjarmasin	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis dan Pemulangan
31	Kec. Pelaihari	29 Agustus 2023	Dugaan KDRT	Jl. Matah Kec. Pelaihari	Datang Sendiri	Terima pengaduan/arahan
32	Kec. Pelaihari	01 September 2023	Dugaan sebagai korban pelecehan seksual	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
33	Kec. Bati-Bati	05 September 2023	Pelecehan seksual	Ds. Banyu Irang Kec. Bati-Bati	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
34	Kec. Bati-Bati	08 September 2023	ABH tersangka penyebaran/penjualan VGK	Ds. Padang Kec. Bati-Bati	KPAI	Pemeriksaan Psikologis
35	Kec. Bajuin	06 Oktober 2023	Pelecehan Seksual/Pencabulan	Ds. Kunit Kec. Bajuin	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
36	Kec. Bajuin	02 Nopember 2023	Kekerasan Seksual/Persetubuhan	Ds. Sungai Bakar Kec. Bajuin	Polsek Pelaihari	Pemeriksaan Psikologis
37	Kec. Pelaihari	08 Nopember 2023	Pelecehan Seksual/Pencabulan	Ds. Podok Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar	Polsek Pelaihari	Pemeriksaan Psikologis

38	Kec. Pelaihari	23 Nopember 2023	Kekerasan Fisik, Psikis/Bullying	Ds. Telaga Kec. Pelaihari	Kepala Sekolah	Penjangkauan
39	Kec. Batu Ampar	29 Nopember 2023	Seksual/Persetubuhan	Ds. Bluru Kec. Batu Ampar	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
40	Kec. Takisung	01 Desember 2023	Dugaan Percobaan Pelecehan Seksual	Ds. Ranggung Kec. Takisung	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis
41	Kec. Takisung	01 Desember 2023	Dugaan Pelecehan Seksual	Ds. Kuala Tambangan Kec. Takisung	UPPA Polres Tanah Laut	Pemeriksaan Psikologis

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001

Pelaihari, 23 Januari 2024
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan
dan Anak



PAHIMAH, SKM, M.Kes
Pembina (IVa)
NIP. 19740404 199903 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

DAFTAR JUMLAH KLIEN KASUS ANAK DI UPTD PPA KABUPATEN TANAH LAUT
PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2023

NO	JUMLAH KLIEN	JUMLAH PELAPORAN/RUJUKAN					DI RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA	KASUS/KLIEN SELESAI	ASAL KLIEN (Wilayah Kecamatan)
		UPPA POLRES	SATPOL PP	DATANG SENDIRI	MASYARAKAT	LAINNYA			
1	41	24	4	2	1	10	0	8	Pelaihari, Kintap, Jorong, Kurau, Panyipatan, Takisung, Batu Ampar, Bati-Bati, Bajuin dan Luar Kab.

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001

Pelaihari, 23 Januari 2024
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan
dan Anak



PAHIMAH, SKM, M.Kes
Pembina (IVa)
NIP. 19740404 199903 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

Pelaihari, 22 Januari 2024

Nomor : 400.12.4.4/071/Disdukcapil/I/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Data Penduduk

Kepada Yth,


Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut

di –

Pelaihari

Menghubung surat Nomor : 100.1.7/31/I/2024/DP2KBP3A tanggal 09 Januari 2024 Perihal Permintaan Data, terlampir kami sampaikan Data Kependudukan sesuai format yang diminta dengan sumber data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007

**DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

DATA PENDUDUK PER KECAMATAN PER JENIS KELAMIN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	17,136	16,599	33,735
2	JORONG	18,360	17,371	35,731
3	PELAIHARI	40,926	40,308	81,234
4	KURAU	7,311	7,212	14,523
5	BATI BATI	23,501	22,694	46,195
6	PANYIPATAN	13,143	12,920	26,063
7	KINTAP	22,864	21,699	44,563
8	TAMBANG ULANG	9,666	9,398	19,064
9	BATU AMPAR	14,678	13,999	28,677
10	BAJUIN	10,197	9,788	19,985
11	BUMI MAKMUR	7,244	7,103	14,347
TOTAL		185,026	179,091	364,117

DATA PENDUDUK WANITA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

NO	KECAMATAN	USIA			
		15-19 TAHUN	20-24 TAHUN	25-29 TAHUN	30-34 TAHUN
1	TAKISUNG	1,177	1,429	1,167	1,241
2	JORONG	1,306	1,442	1,319	1,443
3	PELAIHARI	2,962	3,275	3,032	3,256
4	KURAU	569	626	491	592
5	BATI BATI	1,738	1,904	1,747	1,785
6	PANYIPATAN	952	1,069	956	988
7	KINTAP	1,787	1,813	1,557	1,810
8	TAMBANG ULANG	723	833	728	681
9	BATU AMPAR	1,068	1,179	1,011	1,043
10	BAJUIN	747	838	692	818
11	BUMI MAKMUR	489	599	476	564
TOTAL		13,518	15,007	13,176	14,221

NO	KECAMATAN	USIA		
		35-39 TAHUN	40-44 TAHUN	45-49TAHUN
1	TAKISUNG	1,245	1,416	1,273
2	JORONG	1,471	1,488	1,207
3	PELAIHARI	3,289	3,254	2,954
4	KURAU	539	551	540
5	BATI BATI	1,895	1,989	1,683
6	PANYIPATAN	1,002	1,100	936
7	KINTAP	1,836	1,872	1,542
8	TAMBANG ULANG	771	797	657
9	BATU AMPAR	1,029	1,207	1,048
10	BAJUIN	813	788	708
11	BUMI MAKMUR	560	527	528
TOTAL		14,450	14,989	13,076

DATA PENDUDUK WANITA USIA ≥ 18 TAHUN

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK
1	TAKISUNG	11,929
2	JORONG	11,804
3	PELAIHARI	28,702
4	KURAU	5,182
5	BATI BATI	16,164
6	PANYIPATAN	9,262
7	KINTAP	14,611
8	TAMBANG ULANG	6,594
9	BATU AMPAR	9,935
10	BAJUIN	6,911
11	BUMI MAKMUR	5,040
TOTAL		126,134

DATA REGISTRASI ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	4,977	4,670	9,647
2	JORONG	5,897	5,567	11,464
3	PELAIHARI	12,393	11,606	23,999
4	KURAU	2,141	2,030	4,171
5	BATI BATI	6,973	6,530	13,503
6	PANYIPATAN	3,921	3,658	7,579
7	KINTAP	7,554	7,088	14,642
8	TAMBANG ULANG	2,905	2,804	5,709
9	BATU AMPAR	4,425	4,064	8,489
10	BAJUIN	2,994	2,877	5,871
11	BUMI MAKMUR	2,158	2,063	4,221
TOTAL		56,338	52,957	109,295

DATA KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KIA	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	TAKISUNG	4,374	5,050
2	JORONG	5,174	5,934
3	PELAIHARI	11,900	13,734
4	KURAU	2,376	2,707
5	BATI BATI	6,961	7,474
6	PANYIPATAN	3,709	4,253
7	KINTAP	7,973	8,573
8	TAMBANG ULANG	3,235	3,576
9	BATU AMPAR	4,183	4,654
10	BAJUIN	3,382	3,710
11	BUMI MAKMUR	2,739	2,994
TOTAL		56,006	62,659

Catatan :

* Sumber Data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023



Kepala Dinas,
Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MM., MP
 Pembina Utama Muda / (IV/c)
 NIP. 19680129 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelahari 70814

Email : dinas2kbp3atanahlaut@gmail.com

3) IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$ $\frac{21}{126.134} \times 100.000$ $16,649$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan adalah jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial.Jumlah penduduk Perempuan di provinsi adalah jumlah keseluruhan Perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di kabupaten/kota.



Pelahari, 23 Januari 2024
Pit. Kepala Dinas,

DWI-ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001

DAFTAR JUMLAH KLIEN KASUS PEREMPUAN DI UPTD PPA KABUPATEN TANAH LAUT
PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2023

NO	JUMLAH KLIEN	JUMLAH PELAPORAN/RUJUKAN					DI RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA	KASUS/KLIEN SELESAI	ASAL KLIEN (Wilayah Kecamatan)
		UPPA POLRES	SATPOL PP	DATANG SENDIRI	MASYARAKAT	LAINNYA			
1	21	4	2	13	0	2	0	11	Pelaihari, Takisung, Bajuin, Kurau, Tambang Ulang, Panyipatan, Jorong, Bumi Makmur


Mengetahui,

 Ptt. Kepala Dinas



DWI ANGGRIANI, S.STP
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19780313 199612 2 001

Pelaihari, 23 Januari 2024
 Kepala UPTD Perlindungan
 Perempuan dan Anak



PAHIMAH, SKM, M.Kes
 Pembina (IVa)
 NIP. 19740404 199903 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com


DAFTAR KASUS PEREMPUAN DI UPTD PPA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

PERIODE BULAN JANUARI s.d DESEMBER 2023


NO	KECAMATAN	TANGGAL PELAPORAN	JENIS KASUS	ALAMAT	RUJUKAN DARI	TINDAK LANJUT
1	Kec. Bajuin	26 Januari 2023	Perebutan hak asuh anak	Ds. Tanjung Kec. Bajuin	Datang sendiri	Koordinasi, mediasi
2	Kec. Takisung	31 Januari 2023	RT tidak harmonis	Ds. Benua Tengah Kec. Takisung	Datang sendiri	Konsultasi
3	Kec. Pelaihari	08 Februari 2023	Kekerasan Psikis dalam RT	Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Pemeriksaan Psikologis
4	Kec. Bajuin	16 Februari 2023	Perebutan hak asuh anak	Ds. Tanjung Kec. Bajuin	Datang sendiri	Konsultasi
5	Kec. Pelaihari	09 Maret 2023	KDRT dan Kekerasan Psikis	Ds. Panggung Kec. Pelaihari	UPPA Polres Tala	Pemeriksaan Psikologis
6	Kec. Pelaihari	10 Mei 2023	Kekerasan Psikis	Kab. Balangan (Kost Kec. Pelaihari)	Datang sendiri	Pemeriksaan Psikologis
7	Kec. Bumi Makmur	07 Juni 2023	Diduga terlantar	Ds. Kurau Utara Kec. Bumi Makmur	Dinas Sosial	Pemulangan
8	Kec. Kurau	13 Juni 2023	Perebutan hak asuh anak	Ds. Padang Luas Kec. Kurau	Datang sendiri	Koordinasi, mediasi
9	Kec. Pelaihari	22 Juni 2023	Perebutan hak asuh anak	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Koordinasi, mediasi
10	Kec. Tambang Ulang	04 Juli 2023	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Ds. Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Datang sendiri	Konsultasi, pendampingan

11	Kec. Panyipatan	06 Juli 2023	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Ds. Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	UPPA Polres Tala	Konsultasi, pendampingan
12	Kec. Pelaihari	15 Agustus 2023	Perebutan hak asuh anak	Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Konsultasi
13	Kec. Pelaihari	18 Agustus 2023	Dugaan Penganiayaan oleh Pacar	Yogyakarta / Kost Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Pemeriksaan Psikologis
14	Kec. Pelaihari	21 Agustus 2023	Pesta minuman keras dan suka sesama jenis	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis dan Pemulangan
15	Kec. Pelaihari	05 Oktober 2023	Kekerasan Verbal/ Psikis	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Pemeriksaan Psikologis
16	Kec. Pelaihari	06 Oktober 2023	Prostitusi Online	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Satpol PP dan Damkar	Pemeriksaan Psikologis
17	Kec. Pelaihari	11 Oktober 2023	KDRT	Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Pendampingan Mediasi
18	Kec. Pelaihari	30 Oktober 2023	Perebutan hak asuh anak	Ds. Ujung Batu Kec. Pelaihari	Datang sendiri	Konsultasi
19	Kec. Pelaihari	02 Nopember 2023	KDRT	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	UPTD PPA Kota Bjm	Penjangkauan
20	Kec. Jorong	19 Desember 2023	Pelecehan Seksual/Pencabulan	Ds. Swarangan Kec. Jorong	UPPA Polres Tala	Pemeriksaan Psikologis
21	Kec. Kurau	19 Desember 2023	Pelecehan Seksual/Pencabulan	Ds. Tambak Karya Kec. Kurau	UPPA Polres Tala	Pemeriksaan Psikologis

Mengetahui,
Kep. Plt. Kepala Dinas


DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001

Pelaihari, 23 Januari 2024
Kepala UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak


PAHIMAH, SKM, M.Kes
Pembina (IVa)
NIP. 19740404 199903 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21004 Pelaihari

Pelaihari, 22 Januari 2024

Nomor : 400.12.4.4/071/Disdukcapil/I/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Data Penduduk

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut

di –

Pelaihari

Menghubung surat Nomor : 100.1.7/31/I/2024/DP2KBP3A tanggal 09 Januari 2024 Perihal Permintaan Data, terlampir kami sampaikan Data Kependudukan sesuai format yang diminta dengan sumber data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, M.M., M.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007

**DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

DATA PENDUDUK PER KECAMATAN PER JENIS KELAMIN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	17,136	16,599	33,735
2	JORONG	18,360	17,371	35,731
3	PELAIHARI	40,926	40,308	81,234
4	KURAU	7,311	7,212	14,523
5	BATI BATI	23,501	22,694	46,195
6	PANYIPATAN	13,143	12,920	26,063
7	KINTAP	22,864	21,699	44,563
8	TAMBANG ULANG	9,666	9,398	19,064
9	BATU AMPAR	14,678	13,999	28,677
10	BAJUIN	10,197	9,788	19,985
11	BUMI MAKMUR	7,244	7,103	14,347
TOTAL		185,026	179,091	364,117

DATA PENDUDUK WANITA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

NO	KECAMATAN	USIA			
		15-19 TAHUN	20-24 TAHUN	25-29 TAHUN	30-34 TAHUN
1	TAKISUNG	1,177	1,429	1,167	1,241
2	JORONG	1,306	1,442	1,319	1,443
3	PELAIHARI	2,962	3,275	3,032	3,256
4	KURAU	569	626	491	592
5	BATI BATI	1,738	1,904	1,747	1,785
6	PANYIPATAN	952	1,069	956	988
7	KINTAP	1,787	1,813	1,557	1,810
8	TAMBANG ULANG	723	833	728	681
9	BATU AMPAR	1,068	1,179	1,011	1,043
10	BAJUIN	747	838	692	818
11	BUMI MAKMUR	489	599	476	564
TOTAL		13,518	15,007	13,176	14,221

NO	KECAMATAN	USIA		
		35-39 TAHUN	40-44 TAHUN	45-49TAHUN
1	TAKISUNG	1,245	1,416	1,273
2	JORONG	1,471	1,488	1,207
3	PELAIHARI	3,289	3,254	2,954
4	KURAU	539	551	540
5	BATI BATI	1,895	1,989	1,683
6	PANYIPATAN	1,002	1,100	936
7	KINTAP	1,836	1,872	1,542
8	TAMBANG ULANG	771	797	657
9	BATU AMPAR	1,029	1,207	1,048
10	BAJUIN	813	788	708
11	BUMI MAKMUR	560	527	528
TOTAL		14,450	14,989	13,076

DATA PENDUDUK WANITA USIA ≥ 18 TAHUN

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK
1	TAKISUNG	11,929
2	JORONG	11,804
3	PELAIHARI	28,702
4	KURAU	5,182
5	BATI BATI	16,164
6	PANYIPATAN	9,262
7	KINTAP	14,611
8	TAMBANG ULANG	6,594
9	BATU AMPAR	9,935
10	BAJUIN	6,911
11	BUMI MAKMUR	5,040
TOTAL		126,134

DATA REGISTRASI ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK PADA TAHUN 2022-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2022	14,422
2	2023	12,664
TOTAL		27,086

DATA PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	TAKISUNG	4,977	4,670	9,647
2	JORONG	5,897	5,567	11,464
3	PELAIHARI	12,393	11,606	23,999
4	KURAU	2,141	2,030	4,171
5	BATI BATI	6,973	6,530	13,503
6	PANYIPATAN	3,921	3,658	7,579
7	KINTAP	7,554	7,088	14,642
8	TAMBANG ULANG	2,905	2,804	5,709
9	BATU AMPAR	4,425	4,064	8,489
10	BAJUIN	2,994	2,877	5,871
11	BUMI MAKMUR	2,158	2,063	4,221
TOTAL		56,338	52,957	109,295

DATA KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KIA	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	TAKISUNG	4,374	5,050
2	JORONG	5,174	5,934
3	PELAIHARI	11,900	13,734
4	KURAU	2,376	2,707
5	BATI BATI	6,961	7,474
6	PANYIPATAN	3,709	4,253
7	KINTAP	7,973	8,573
8	TAMBANG ULANG	3,235	3,576
9	BATU AMPAR	4,183	4,654
10	BAJUIN	3,382	3,710
11	BUMI MAKMUR	2,739	2,994
TOTAL		56,006	62,659

Catatan :

* Sumber Data yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023



Kepala Dinas,
Dr. Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MM., MP
 Pembina Utama Muda / (IV/c)
 NIP. 19680129 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1) IKK Outcome : TFR (Angka Kelahiran Total)

Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Rumus	:	$TFR = 5 \sum_{i=1}^{i=7} ASFRi$ $ASFRi = \frac{b_i}{p_i} \times 1000$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>
Keterangan	:	▪ Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) adalah hasil perhitungan rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun).



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

AGE SPESIFIK FERTILITY RATE (ASFR)

Kelompok Umur Wanita	Jumlah Penduduk Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4) = (3):(2) x 1.000	(5)
15 – 19 Tahun	13,518	431	31,88	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times 1000$
20 – 24 Tahun	15,007	1,494	99,55	
25 – 29 Tahun	13,176	1,671	126,82	
30 – 34 Tahun	14,221	1,206	84,80	
35 – 39 Tahun	14,450	707	48,93	
40 – 44 Tahun	14,989	210	14,01	
45 – 49 Tahun	13,076	14	1,07	
Jumlah	98,437	5,733	407,07	

Sumber :

1. Jumlah Kelahiran Tahun 2023 (Diolah)
2. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Tanah Laut PK 2023
3. Angka Hasil Pembulatan

TOTAL FERTILITY RATE (TFR)

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^{i=7} ASFR_i$$

$$TFR = 5 \times (31,88 + 99,55 + 126,82 + 84,80 + 48,93 + 14,01 + 1,07)$$

$$TFR = 5 \times 407,07$$

$$TFR = 2035,35 \text{ per } 1.000 \text{ penduduk usia } 15\text{-}49 \text{ tahun}$$

$$TFR = 2,035 \text{ anak untuk setiap wanita usia } 15\text{-}49 \text{ tahun}$$

Pelaihari, 23 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas,



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

2) IKK Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Konsep/Definisi	:	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri
Rumus	:	$= \frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $= \frac{49997}{61163} \times 100\%$ $= 81,74\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah peserta KB aktif modern adalah seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan.;▪ Jumlah Pasangan Usia Subur adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah kecamatan di kabupaten/kota.

Pelaihari, 23 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas,



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JUMLAH PESERTA KB AKTIF
BULAN : DES - 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN
Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
01	TAKISUNG	5097	2411	2215	44	247	40	4	125	0	5086	11
02	JORONG	5211	3403	1241	51	314	63	0	122	7	5201	10
03	PELAIHARI	8964	5341	2421	118	549	251	12	230	2	8924	40
04	KURAU	2201	1258	729	22	156	10	6	18	0	2199	2
05	BATI BATI	6805	3577	2598	50	381	68	1	121	0	6796	9
06	PANYIPATAN	4070	2719	750	64	413	46	2	65	0	4059	11
07	KINTAP	5702	3539	1624	10	306	54	12	131	6	5682	20
08	TAMBANG ULANG	2865	1316	1234	41	212	15	2	40	1	2881	4
09	BATU AMPAR	3963	2179	1075	87	301	123	6	177	0	3948	15
10	BAJUIN	2959	1332	1041	47	310	124	2	99	0	2956	4
11	BUMI MAKMUR	2160	1039	983	20	91	8	1	10	0	2152	8
JUMLAH TOTAL		49997	28114	15911	554	3280	802	48	1138	16	49907	134

Rumus $\frac{\text{Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Pasangan Usia Subur}} \times 100 \%$

$\frac{49997}{61163} \times 100 \% = 81,74 \%$

Pelaihari, 19 Januari 2024

A.n Kepala Dinas
Sekretaris,





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JUMLAH PUS MENURUT STATUS HAMIL, KEINGINAN PUNYA ANAK, DAN KESERTAAN BER-KB
BULAN : DES - 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN
Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB						JUMLAH UNMET NEED
			HAMIL			TIDAK HAMIL			
			INGIN HAMIL SEGERA	INGIN HAMIL NANTI KE MUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK NANTI KE MUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	TAKISUNG	5971	0	0	0	352	56	199	255
02	JORONG	6514	0	0	0	486	104	246	350
03	PELAIHARI	11659	0	0	0	1386	202	542	744
04	KURAU	2767	0	0	0	202	45	89	134
05	BATI BATI	8006	0	0	0	507	79	170	249
06	PANYIPATAN	4724	0	0	0	284	70	100	170
07	KINTAP	7232	0	0	0	508	241	335	576
08	TAMBANG ULANG	3565	1	0	0	267	76	132	208
09	BATU AMPAR	4747	0	0	0	339	52	160	212
10	BAJUIN	3547	0	0	0	252	48	84	132
11	BUMI MAKMUR	2431	0	0	0	140	5	39	44
Jumlah Total		61163	1	0	0	4723	978	2096	3074

Rumus $\frac{\text{Jumlah PUS yg ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$

$$\frac{3074}{61163} \times 100 \% = 5,03 \%$$

Pelaihari, 19 Januari 2024

An Kepala Dinas
Sekretaris,



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Teknis (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

3) IKK Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Rumus	:	$= \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$ $= \frac{3074}{61163} \times 100\% $ $= 5,03\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi per diwilayah kabupaten/kota.▪ Jumlah Pasangan Usia Subur adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) diwilayah provinsi.

Pelaihari, 23 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas,



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19780313 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JUMLAH PUS MENURUT STATUS HAMIL, KEINGINAN PUNYA ANAK, DAN KESERTAAN BER-KB
BULAN : DES - 2023

Prov : KALIMANTAN SELATAN
Kab : TANAH LAUT

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB						JUMLAH UNMET NEED
			HAMIL			TIDAK HAMIL			
			INGIN HAMIL SEGERA	INGIN HAMIL NANTI/KEMUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK NANTI/KEMUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	TAKISUNG	5971	0	0	0	352	56	199	255
02	JORONG	6514	0	0	0	486	104	246	350
03	PELAHARI	11659	0	0	0	1386	202	542	744
04	KURAU	2767	0	0	0	202	45	89	134
05	BATI BATI	8006	0	0	0	507	79	170	249
06	PANYIPATAN	4724	0	0	0	284	70	100	170
07	KINTAP	7232	0	0	0	508	241	335	576
08	TAMBANG ULANG	3565	1	0	0	267	76	132	208
09	BATU AMPAR	4747	0	0	0	339	52	160	212
10	BAJUIN	3547	0	0	0	252	48	84	132
11	BUMI MAKMUR	2431	0	0	0	140	5	38	44
Jumlah Total		61163	1	0	0	4723	978	2096	3074

Rumus $\frac{\text{Jumlah PUS yg ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$

$$\frac{3074}{61163} \times 100 \% = 5,03 \%$$

Pelaihari, 19 Januari 2024
A.n Kepala Dinas
Sekretaris,



DWI ANGGRIANI, S.STP
Pembina TV (IV/b)
NIP. 19780313 199612 2 001